

**PENGARUH PENGAWASAN DAN EVALUASI
PEMBERIAN KREDIT TERHADAP PERKEMBANGAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI
TELUK KUANTAN (STUDI KASUS PT. BANK RIAU KEPRI
CABANG TELUK KUANTAN)**

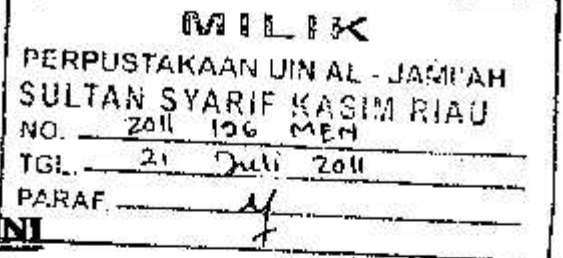
SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru*



OLEH :

TUTI SURLIANI
10771000202



**PROGRAM SI
JURUSAN MANAJEMEN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2011**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : TUTI SURLIANI


NIM : 10771000202

JURUSAN : MANAJEMEN

**JUDUL : PENGARUH PENGAWASAN DAN EVALUASI
PEMBERIAN KREDIT TERHADAP PERKEMBANGAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI TELUK
KUANTAN (STUDI KASUS PT. BANK RIAU KEPRI
CABANG TELUK KUANTAN)**

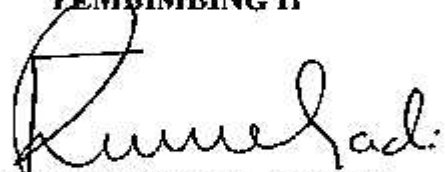
DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING I



Drs. AZWAR HARAHAP, M.Si
NIP : 19560202198403 1 002

PEMBIMBING II



TRIAN ZULHADI, SE, M.Ec
NIP : 197602112007101002


MENGETAHUI

DEKAN



Drs. AZWAR HARAHAP, M.Si
NIP : 19560202 198403 1 002

KETUA JURUSAN



MAHENDRA ROMUS, M.Ec, PhD
NIP : 19711119 200501 1 004

ABSTRAK

PENGARUH PENGAWASAN DAN EVALUASI PEMBERIAN KREDIT TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI TELUK KUANTAN (STUDI KASUS PT.BANK RIAU KEPRI CABANG TELUK KUANTAN)

Oleh:

TUTI SURLLANI

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengawasan dan evaluasi pemberian kredit terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Teluk Kuantan. Yang diberikan oleh PT. Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan.

Hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : "Diduga pengawasan dan evaluasi kredit yang dilakukan PT. Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan UMKM di Teluk Kuantan.

Penelitian ini memerlukan data primer dan data sekunder ,data primer adalah data yang diperoleh dari survey dengan metode wawancara dan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada nasabah yang menjadi responden terpilih, sedangkan data sekunder adalah data yang penulis dapat dari PT. Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan. Adapun populasi dalam penelitian adalah masyarakat Teluk Kuantan yang menjadi nasabah UMKM pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan, dan yang dijadikan sampel adalah sebanyak 25 orang dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu sampel yang diambil berdasarkan kriteria tertentu, dengan catatan sampel tersebut mempunyai hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode regresi linier dan data tersebut dianalisis menggunakan program SPSS V.17.

Pada penelitian ini ada dua variabel bebas (X) yaitu : Pengawasan kredit dan Evaluasi pemberian Kredit serta variabel terikat (Y) yaitu : perkembangan UMKM.

Dari penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut : bahwa pengawasan kredit dan evaluasi pemberian kredit secara bersama-sama atau simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan UMKM di Teluk Kuantan. Begitu juga secara parsial atau secara sendiri-sendiri pengawasan kredit dan evaluasi pemberian kredit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyarankan kepada pihak PT. Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan diharapkan lebih meningkatkan pengawasan dan evaluasi pemberian kredit agar kredit yang disalurkan kepada masyarakat dalam hal ini UMKM dapat meningkatkan perkembangan dari UMKM dan perekonomian masyarakat.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas selesainya tugas ilmiah ini dalam bentuk penulisan skripsi. Shalawat serta salam juga penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena merupakan teladan umat yang patut kita contohkan yang telah mengadakan amar ma'ruf nahi munkar di permukaan bumi ini.

Penulis menyadari tanpa adanya ridho dari Allah SWT, penulis tidak akan dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul *"Pengaruh pengawusan dan evaluasi pemberian kredit terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Teluk Kuantan (studi kasus PT.Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan)"* Untuk itu saya mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan waktu, pengetahuan dan keterampilan yang penulis miliki. Namun berkat bimbingan, petunjuk dan bantuan serta arahan dari berbagai pihak skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Schubungan dengan itu, maka dengan penuh rasa hormat penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M Nazir, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Bapak Drs. Azwar Harahap, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan selaku pembimbing I.
3. Bapak DR. Mahendra Romus,SP,M.Ec selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
4. Bapak Trian Zulbadi, SE, M.Ec selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, serta bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Ayah Ibu tercinta (Ayah Syamsuri dan Ibu Nurlaili) yang dengan tulus ikhlas telah memberikan pengorbanan baik materi dan non materi maupun yg lainnya yang tidak terhingga kepada penulis.
7. Buat adek ku sayang Ridho Firmansyah dan keluarga besar nenek, ibu, etek, ante, mamak dan adek adek sepupuku yang slalu memberikan perhatian, dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini, thank's atas motivasi dan do'a nya
8. Buat tunanganku Nurdedi,S.Sos yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta selalu membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.

9. Tak lupa buat teman-teman seperjuangan jurusan manajemen A angkatan 2007. dan lainnya yg tak bisa dituliskan satu persatu yang telah sama-sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi. Dan buat teman temanku di kos.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah-Nya atas apa yang telah diberikan kepada penulis serta mendapat balasan yang setimpal dengan amal. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, amin.

Pekanbaru, 20 Mei 2011

TUTI SURLIANI

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN PENGESAHAN.....	
LEMBARAN PERSETUJUAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1 Pengertian Pengawasan Kredit	10
2.2 Tujuan Pengawasan Kredit.....	10
2.3. Pelaksanaan pengawasan kredit.....	11
2.4. Evaluasi Pemberian Kredit	16
2.5 Teori pemberian kredit.....	20
2.6 Tujuan dan Fungsi Pemberian kredit	22
2.7 Prinsip pemberian kredit dengan Analisa 5C dan Analisa 7P	25
2.8 Teori perbankan	28
2.9 Fungsi Bank	30
2.10 karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah	31
2.11 Permasalahan Perkembangan UMKM.....	36
2.12 Strategi pengembangan UMKM	37
2.13 Pentingnya Modal Bagi perkembangan UMKM.....	38

2.14 Keunggulan perkembangan UMKM	40
2.15 Penjualan secara kredit dalam pandangan islam	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Lokasi penelitian	43
3.2 Jenis dan sumber data	43
3.3 Populasi dan Sampel	43
3.3.1 Populasi	43
3.3.2 Sampel	44
3.4 Variabel Penelitian	44
3.5 Metode pengumpulan data	45
3.6 Instrumen penelitian	45
3.6.1 Uji kualitas data	45
3.6.2 Validitas	45
3.6.3 Reliabilitas	46
3.7 Analisis data	46
3.8 Analisis koefisien berganda (Uji R)	47
3.9 Koefisien Determinasi berganda (R^2 /Square	47
3.10 Uji F	47
3.11 Uji T	48
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PERUSAHAAN	
4.1 Sejarah singkat PT. Bank Riau Kepri	49
4.2 Maksud dan tujuan pendirian	51
4.3 Fungsi dan tugas	54
4.4 Struktur organisasi	55
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Hasil pengumpulan data dan demografis responden	59
5.1. Hasil pengumpulan data	59
5.2 Analisis Pengawasan Kredit	61
5.3 Analisis Evaluasi Kredit	63
5.4. Analisis perkembangan UMKM	67

5.2	Metode analisi data.....	70
5.2.1	Uji Kualitas data.....	70
5.2.2	Uji Validitas.....	70
5.2.3	Uji Reliabilitas.....	71
5.2.4	Analisis koefisien (uji R).....	72
5.2.5	Analisi koefisien berganda (R Square).....	72
5.2.6	Penerimaan hipotesis dan pembahasan.....	72
5.2.7	Pengujian variabel secara simultan (uji F).....	75
5.2.8	Pengujian variabel secara parsial (uji t).....	76
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN		
6.1	Kesimpulan.....	78
6.2	Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA		80
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang masalah

Pada dasarnya usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan ekonomi bangsa Indonesia. Sektor usaha ini merupakan lapangan bagi kegiatan ekonomi bagi jutaan penduduk Indonesia dewasa ini dan masa yang akan datang. Maka pengusaha dan tenaga kerja yang tergolong rakyat kecil dan lemah dalam berbagai hal, lemah dalam organisasi dan manajemen, lemah dari segi modal dan sebagainya sudah selayaknya mendapatkan perlindungan dan pembinaan dari pemerintah agar mereka dapat tumbuh berkembang menjadi suatu kekuatan dalam pembangunan ekonomi, karena peran sektorial yang sangat besar sudah layak pertumbuhannya diperhatikan.

Hal tersebut menjadikan perbankan semakin menduduki tempat yang penting terutama dalam hal mendorong dan menopang perkembangan ekonomi baik dalam sektor industri, perdagangan, pertanian, pertambangan, perkebunan, pengangkutan, Listrik/ Gas/ Air, Konstruksi, Jasa Dunia Usaha, Jasa kemasyarakatan, dan sektor sektor lainnya dewasa ini.

Selubungan dengan hal tersebut pemerintah melalui PT. Bank Riau Kepri Kantor Pusat Pekanbaru yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau yang bergerak dibidang perbankan yang mempunyai misi dan fungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pertumbuhann daerah, mewujudkan kepedulian

dan peran sertanya dalam bentuk pemberian fasilitas kredit kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Alasan penulis tertarik memilih Bank Riau sebagai objek penelitian tentang masalah pemberian kredit ini adalah karena PT. Bank Riau Kepri merupakan lembaga keuangan daerah terbaik di Riau dan di Sumatra yang ingin menjadi tuan rumah didaerahnya sendiri (Riau). Dan pada saat ini bank Riau berada diposisi pertama di luar daerah Jawa dari seluruh bank-bank daerah yang menyalurkan kredit UMKM yang tetap memperhatikan perkembangan UMKM di Provinsi Riau dengan cara terus memberikan porsi anggaran kredit yang maksimal untuk UMKM tersebut.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai bank umum, Bank Riau Kepri komit akan menggerakkan fungsi intermediasinya memberi bantuan kredit kepada dunia usaha ditandai dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MOU) oleh ketua kadin riaudengan Direktur Utama Bank Riau pada tanggal 22 April 2008 dihotel pangeran pekanbaru yang menghasilkan empat kesepakatan yang salah satunya berisi mendorong peranan Bank Riau Kepri lebih produktif untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan mengupayakan skim khusus cepat dan mudah tanpa jaminan kepada UMKM, sehingga dalam hal ini diharapkan dapat melahirkan pengusaha mikro kecil dan menengah yang berbasis kerakyatanyang berkembang dan tangguh secara wajar.

UMKM dianggap sebagai ekonomi rakyat atau tulang punggung indonesia, yang mana untuk perkembangan usahanya harus diberi perhatian dan bantuan modal. Keberadaan UMKM sebagai masalah ekonomi indonesia biasanya menjadi argumentasi untuk memberi bantuan. Dengan kata lain

pentingnya modal dengan UMKM menjadi alasan bagi pemerintah untuk melakukan atau membuat program pemberian bantuan dalam permodalan, padahal pertumbuhan UMKM ialah akses negatif krisis demi mempertahankan hidup atau sekedar survive (Dalam Ritonga, 2006).

Kemudian dari pada itu, pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Isa Firmansyah : 2008) dengan judul *"Peranan pemberian kredit Bank Riau terhadap perkembangan usaha pedagang kecil di Kota Pekanbaru"*. Disimpulkan bahwa, pemberian kredit kepada pedagang kecil sangat mempengaruhi perkembangan usaha kecil tersebut, itu dapat dilihat dari perkembangan keuntungan usaha kecil itu dari tahun ketahun terus bertambah dan berkembang, serta mempunyai prospek yang baik kedepan.

Berdasarkan penelitian diatas, penulis ingin melakukan penelitian ditempat atau lokasi yang berbeda, untuk melihat perkembangan UMKM di Teluk Kuantan, Dalam hal ini, penulis melihat dari pengaruh pengawasan dan evaluasi kredit terhadap perkembangan UMKM tersebut.

Berikut adalah data perkembangan modal UMKM di Teluk Kuantan sebelum dan setelah diberikan pinjaman oleh pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan Dari tahun 2006 s.d 2010, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1. : Jumlah Modal awal yang dimiliki Nasabah UMKM, jumlah kredit yang diterima, besarnya laba dan akhir yang didapat setelah memperoleh kredit dari PT. Bank Rian Kepri Cabang Teluk Kuantan

Kuantitas						
No	Nama Nasabah	Jenis Usaha	Modal Awal	Jumlah Kredit	Laba Usaha (perbulan)	Modal Akhir
1	Ismail	Warung sembako	15.000.000	10.000.000	3.505.000	18.505.000
2	Baharudin	Penjual ikan	20.000.000	15.000.000	5.515.000	25.515.000
4	Beni. S	Counter	15.000.000	15.000.000	2.500.000	17.500.000
5	A. Riki	Bengkel/ suku cadang	45.000.000	25.000.000	6500.000	51.500.000
4	Murniati. SE	Warnet	85.000.000	50.000.000	25.000.000	115.000.000
5	Astuti	Grosir pakaian	65.000.000	50.000.000	15.000.000	
6	Sofyan	Pengusaha perabot	100.000.000	85.000.000	5000.000-15.000.000	115.000.000
7	Anita	Salon	35.000.000	10.000.000	2.500.000	37.500.000
8	Tati	Rumah Makan	10.000.000	10.000.000	4500.000	14.500.000
9	Edison	Pedagang Ayam	3.500.000	5.0000.000	1.500.000	5000.000
11	Suyono	Warung Bakso	5.000.000	5.000.000	3.500.000	8.500.000
12	Marlina	Buah-Buahan	3000.000	5000.000	2.500.000	5.500.000
13	Suhardi	Toko Bangunan	150.000.000	85.000.000	5.000.000-20.000.000	170.000.000
14	Edi. S. Spd	Photo Copy dan Studio Photo	150.000.000	50.000.000	6.000.000	156.000.000
15	Tarsupon. Spdi	Photo Copy	65.000.000	50.000.000	4.000.000	69.000.000
16	Hadi. I	Kedai Makanan dan Minuman	10.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000
17	Amir	Warung Sembako	5.000.000	5.000.000	1.750.000	6.750.000

19	Hendra	Toko Sepatu	8.000.000	5000.000	4.500.000	12.500.000
20	Rahmadi	Toko Elektronik	100.000.000	100.000.000	6.000.000	106.000.000
21	Saliman	Penjual Daging	15.000.000	5.000.000	5.000.000	20.000.000
22	Shaleh.A. Spd	Toko Buku/Alat Tulis	45.000.000	10.000.000	3.000.000-6.000.000	51.000.000
23	Aswinek. Spd	Peralatan Olahraga	120.000.000	75.000.000	6.000.000	180.000.000
24	Siti. R	Warung Bakso	5.000.000	5.000.000	3.500.000	8.500.0000
25	Depi. I	Toserba	20.000.000	10.000.000	6.500.000	26.500.000

Sumber : PT. Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan

Pada tabel diatas, dari beberapa nasabah yang telah memperoleh pemberian kredit UMKM oleh PT. Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan dapat dilihat bahwa laba atau pendapatan perbulan dan modal akhir mengalami peningkatan yang positif. Laba yang diperoleh nasabah UMKM berkisar antara 10% s.d 20% perbulannya.

Sementara dalam skripsi yang dibuat oleh Said Alfaraziyang berjudul pengaruh pemberian kredit terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pekanbaru ditemui adanya hasil positif yang diperoleh nasabah terhadap peningkatan modal dan volume penjualan serta peningkatan laba usaha yang positif.

Adapun plafond serta tingkat suku bunga kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dikelompokkan berdasarkan jenis kreditnya dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Plafond dan tingkat suku bunga berdasarkan jenis jenis kredit Mikro Kecil dan Menengah pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan

No	Jenis kredit	Plafon	Suku Bunga	Metode
1	Kredit BPD Peduli	s.d Rp 15 juta	12%	Flat
2	Kredit Tanpa Agunan	s.d Rp 15 juta	15%	Flat
3	Kredit Pengusaha mikro	s.d Rp 50 juta	14%	Flat
4	Kredit pengusaha kecil berjadual	> Rp 50 juta s.d 100 juta	14%	Flat
5	Kredit pengusaha kecil berjadual	> Rp 100 juta s.d 500 juta	14%	Menurun
6	Kredit pengusaha kecil rekening	> Rp 100 juta s.d 500 juta	14%	Harian
7	Kredit kepada koperasi LKM	s.d Rp 500 juta	12%	Menurun/harian
8	Kredit usaha Mikro SUP 005	s.d Rp 500 juta	14%	Menurun
9	Kredit ketahanan pangan dan energy (KKPE)	s.d Rp 500 juta	15% s.d 17 %	Disesuaikan dengan peraturan pemerintah
10	Kredit Agribisnis	Sesuai kebutuhan	15%	
11	Kredit pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Peternakan (KPEN-RP)	Total Project Cos + Bunga masa pembangunan	Masa pembangunan 7%	
12	Kredit kedai Bank Riau	s.d Rp 100 juta	14%	

Sumber : PT. Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan

Pada tabel 1.2 diatas, dari berbagai jenis kredit UMKM yang tela disalurkan oleh PT. Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan dapat dilihat bahwa pemberian kredit pada pengusaha Mikro Kecil dan Menengah dengan tingkat suku bunga 14% dan plafondnya sampai dengan 50 juta, kredit pengusaha kecil berjadual dengan suku bunga 14% dan plafondnya > 50 juta s.d 100 juta,

sedangkan kredit usaha Mikro dan Kecil SUP 005 dengan tingkat suku bunga 14%, dengan plafond s.d 500 juta.

Dalam pemberian kredit, PT. Bank Riau Kepri juga melakukan program pelatihan dan pembinaan sebelum UMKM tersebut mendapatkan kredit, para pengusaha UMKM dibina dari segi manajemen usahanya sampai dengan pengelolaan dana mereka lebih mengacu kepada pengusaha professional. Oleh sebab itu masalah prosedur tentang permohonan kredit bisa dimengerti dan dipahami oleh pengusaha UMKM dan untuk kedepannya mereka akan terbiasa dengan Bank, dan Bank pun akan lebih percaya kepada pengusaha tersebut untuk mendapatkan kredit yang lebih besar lagi guna mengembangkan usahanya. Program tersebut disambut positif oleh nasabah kredit UMKM dengan meningkatkan jumlah nasabah UMKM yang melakukan peminjaman kredit pada PT. Bank Riau Kepri cabang Teluk Kuantan.

1.2. Perumusan masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas, maka penulis mencoba mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut.

“Apakah Pengawasan dan Evaluasi pemberian kredit yang di berikan oleh PT. Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan berpengaruh terhadap perkembangan usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Teluk Kuantan.”

1.3.. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian,

Untuk mengetahui pengaruh pengawasan dan evaluasi pemberian kredit terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Teluk Kuantan yang diberikan oleh PT. Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan

2. Manfaat penelitian

- a. Sebagai sarana bagi peneliti untuk dapat memahami dan menerapkan teori teori yang di dapat di bangku kuliah.
- b. Untuk memberikan informasi kepada Bank Riau dalam perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan lebih meningkatkan perannya dalam pemberian kredit untuk masa yang akan datang.
- c. Diharapkan juga dapat membantu dan memberikan sunbangan kepada masyarakat tentang manfaat dan kegunaan perbankan.

1.4. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah melakukan penelitian, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi empat bagian:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini di uraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan teori yang berhubungan dengan pembahasan penelitian dan pembahasan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang Lokasi penelitian, jenis dan Sumber data, populasi dan Sampel, Variabel penelitian, Innstrumen penelitian, Metode pengumpulan data, dan Analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini mencakup sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, aktivitas perusahaan dan proses produksi

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dikemukakan mengenai hasil penelitian yang berhubungan dengan variable penelitian

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis membuat kesimpulan dan saran sebagai masukan yang dikemukakan atas dasar analisis yang telah dilakukan.

BAB 11

TELAAH PUSTAKA

2.1. Pengertian pengawasan kredit

Menurut (Subardjono, 2003: 230) Pengawasan kredit adalah kegiatan pengawasan/ monitoring terhadap tahapan tahapan proses pemberian kredit, pejabat kredit yang melaksanakan proses pemberian kredit serta fasilitas kreditnya. Pengawasan kredit dapat dilakukan oleh pihak Eksternal dan pihak Internal. Pengawasan Eksternal dilakukan oleh Bank Indonesia, Masyarakat, Legislatif (DPR) Sedangkan pengawasan Internal dilakukan oleh tiga pihak yaitu : Pihak atasan langsung, pejabat lain yang berbeda fungsi dan dan pihak satuan kerja Audit internal.

2.2. Tujuan pengawasan kredit

Pengawasan kredit bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan, penjagaan dan pengawasan kredit asset/kekayaan bank telah dilakukan dengan baik sehingga tidak timbul resiko kredit yang di akibatkan penyimpangan baik oleh debitur maupun intern Bank. Obyek pengawasan Bank mencakup semua pejabat Bank yang terkait dengan bidang perkreditan dan semua jenis fasilitas kredit yang diberikan termasuk kredit kepada pihak pihak yang terkait dengan Bank.

Kemudian pengawasan kredit dilakukan secara berkesinambungan sejak permohonan kredit sampai dengan pelunasan atau penyelesaian kredit. Pengawasan kredit dapat dilakukan berdasarkan pada laporan yang disampaikan

secara berkala dan atau informasi lain yang relevan (*off site*) maupun peninjauan secara langsung (*on site*) atas seluruh kegiatan usaha debitur.

Pengawasan secara langsung maupun tidak langsung dilakukan dalam rangka pembinaan kepada debitur untuk mendeteksi secara dini kemungkinan adanya masalah yang timbul dan berisiko bagi keamanan kredit yang telah diberikan, mengantisipasi masalah tersebut dan menyusun rencana serta mengambil langkah perbaikan sebagaimana mestinya. Deteksi secara dini atas masalah masalah yang menimpa debitur dapat dilakukan dengan melihat adanya perubahan perubahan yang tidak menggembirakan dari aspek keuangan, aspek manajemen, aspek operasional, aspek perbankan dan aspek eksternal lainnya dari usaha debitur. (Suhardjono, 2003 : 233-234)

2.3. Pelaksanaan pengawasan kredit

Pengawasan kredit dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan Preventative dan pengawasan Represif. Pengawasan Preventative dimaksudkan untuk mencegah terjadinya masalah dalam perkreditan yang dapat dilakukan dengan penerapan prinsip kehati hatian pada setiap tahapan pemberian kredit sejak permohonan/prakarsa sampai dengan pencairan kredit. Sedangkan pengawasan Represif dimaksudkan untuk memperbaiki masalah yang terjadi dalam bidang perkreditan yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara setelah kredit direalisasikan dan digunakan oleh debitur sampai kredit lunas.

Pengawasan Preventatif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: pengawasan ganda dan pengawasan melekat.

- a. Pengawasan Ganda adalah

Pengawasan ganda adalah: Pengawasan yang dilakukan oleh dua orang pejabat yang berbeda fungsi terhadap setiap tahapan proses pemberian kredit, dengan maksud mencegah penyalahgunaan kredit dan atau penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian financial bagi bank. Pengawasan ganda dilakukan pada setiap tahapan proses pemberian kredit yaitu sebagai berikut:

a) Pengawasan ganda pada proses prakarsa kredit

Pengawasan ganda pada tahapan ini dilakukan oleh unit kerja administrasi kredit dan pejabat pemprakarsa kredit.

b) Pengawasan ganda pada tahapan proses analisa dan evaluasi kredit

Pengawasan ganda pada tahapan analisa dan evaluasi kredit dilakukan oleh pejabat pemprakarsa dan pejabat perekomendasi kredit.

c) Pengawasan Ganda pada tahapan proses penyusunan tipe dan struktur penyusunan kredit.

Pada tahapan ini pengawasan ganda dilakukan oleh pejabat pemprakarsa dan perekomendasi kredit, pejabat perekomendasi kredit harus memastikan bahwa tipe dan struktur kredit telah sesuai dengan ketentuan.

d) Pengawasan Ganda pada tahapan proses melengkapi paket kredit

Pada tahapan ini pengawasan ganda dilakukan oleh pejabat administrasi kredit dan pemutus kredit, pejabat pemutus kredit harus memperhatikan bahwa dokumen kredit telah lengkap dan sah secara yuridis sebelum kredit di putus.

e) Pengawasan ganda pada tahapan proses pemberian putusan kredit

f) Pada tahapan ini pengawasan ganda dilakukan oleh pejabat administrasi kredit dan pemutus kredit, pejabat administrasi harus memperhatikan hal berikut

yaitu; Setiap putusan kredit harus dilakukan secara tertulis, keputusan kredit dilakukan oleh pejabat pemutus kredit yang mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Direksi, Keputusan kredit harus dilakukan pada analisa kredit dan profesionalisme pejabat pemutus kredit.

g) Pengawasan ganda pada tahapan pembuatan perjanjian kredit

Pengawasan pada tahapan ini dilakukan oleh pejabat pemutus kredit dan pejabat administrasi kredit, hal yang perlu diperhatikan adalah ; Perjanjian kredit harus dibuat sesuai yang tercantum dalam putusan kredit, pihak yang menandatangani perjanjian kredit adalah pihak yang menjadi peminjam seperti yang disebutkan dalam putusan kredit.

b. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah: kegiatan yang bersifat pengendalian secara terus menerus yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahan, agar tugas bawahan berjalan secara efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan yang berlaku. Pengawasan Melekat terdiri dari dua macam yaitu:

- a) Pengawasan atasan langsung (PAL) adalah : pengawasan yang melekat pada setiap atasan. Sasaran PAL adalah bawahan dapat melaksanakan tugasnya sesuai uraian tugas dan tanggung jawabnya masing masing.
- b) Sistem pengendalian Manajemen (SPM) adalah segala usaha untuk mengendalikan, menjamin dan mengarahkan agar setiap tugas serta rencana dapat berjalan sebagaimana mestinya. SPM melekat pada organisasi, kebijakan, system dan prosedur, perencanaan dan pembinaan kredit. (Suhardjono, 2003: 235-237)

Prinsip prinsip dalam pengawasan melekat adalah sebagai berikut:

- a) Pengawasan melekat dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang, namun pada saat tertentu dapat dilakukan pengawasan melekat pada setiap jenjang bawahannya
 - b) Pengawasan melekat harus dilakukan oleh setiap pimpinan sebagai salah satu fungsi manajemen.
 - c) Pengawasan melekat diarahkan pada usaha pencegahan terhadap penyimpangan, karna itu perlu ada sistem yang dapat mencegah penyimpangan.
 - d) Pengawasan melekat bersifat membina, karna itu penentuan adanya suatu penyimpangan harus didasarkan pada kriteria yang jelas dan penyimpangan tersebut harus dideteksi secara dini
 - e) Pengawasan melekat harus merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan sebagai kegiatan rutin.
 - f) Pengawasan melekat harus dilaksanakan dengan menggunakan system tertentu.
 - g) Pengawasan melekat merupakan system pengawasan yang utama, sedangkan pengawasan lain merupakan pengawasan penunjang.
- c. Pengawasan Represif

Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kredit berjalan. Pengawasan represif sangat penting bagi bank, karena pada umumnya permasalahan perkreditan muncul setelah kredit dicairkan. Pengawasan Represif dilakukan secara aktif dan secara pasif, Pengawasan Represif secara aktif dilakukan dengan cara mengadakan kunjungan langsung ke tempat usaha debitur

atau tempat lain yang ada kaitannya dengan pemberian fasilitas kredit, secara langsung akan dapat diketahui permasalahan yang dihadapi debitur.

Pengawasan Represif secara aktif ini bertujuan untuk :

- a) Memeriksa seeluruh keterangan/data maupun laporan yang di sampaikan oleh debitur dibandingkan dengan keadaan nyata dilapangan.
- b) Secara langsung dapat melihat usaha debitur dan mengadakan wawancara dengan nasabah tentang seluruh aktifitas usahanya dan permasalahan yang dihadapi dalam mengolah usahanya.
- c) Secara tidak lansung mengingatkan debitur bahwa bank menaruh perhatian atas kegiatan usahanya, sehingga diharapkan debitur akan selalu berusaha untuk melaksanakan ketentuan dan syarat syarat kredit yang telah disepakati.
- d. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional kredit Bank dilakukan oleh auditor internal Bank organisasi yang dibentuk dengan fungsi sebagai pengawasan intern, terhadap terhadap satu unit kerja kantor cabang yang dapat dilakukan setiap periode tertentu misalnya setahun sekali, namun demikian apabila terdapat probabilitas risiko kredit yang tinggi maka audit internal Bank dapat melakukan audit lebih cepat dari yang direncanakan.

- e. Pengawasan Eksternal

Pengawasan Eksternal dapat dilakukan oleh Bank Indonesia, Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKB), Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) dan sebagainya, Pengawasan oleh Bank Indonesia dilakukan secara langsung (On site) maupun secara administrative (Off site). Pengawasan langsung dilakukan dengan melakukan pengawasan kemasing masing Bank, sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan memonitor laporan keuangan Bank yang dikirim masing masing Bank setiap bulan (Laporan Bank Umum/ LBC).

Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia mencakup, antara lain:

- a) Apakah proses pemberian kredit telah jalan sesuai dengan pedoman tertulis pemberian kredit yang dibuat oleh bank.
- b) Apakah dalam pemberian kredit, bank tidak melakukan pelanggaran atas batas maksimum pemberian kredit (BMPK).
- c) Apakah dalam melakukan kolektibilitas pinjaman dan penyesihan cadangan sktiva produktif telah sesuai dengan ketentuan yang ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia
- d) Apakah dalam pemberian kredit pihak pihak yang terkait dengan Bank dan Debitur sesuai dengan ketentuan. (Suhardjono, 2003 :242-246)

2.4. Evaluasi Pemberian Kredit

Evaluasi dan analisa pemberian kredit dituangkan dalam format yang telah ditetapkan oleh Bank dan disesuaikan dengan jenis kreditnya. Dalam Evaluasi dan analisa tersebut sekurang kurangnya mencakup informasi sebagai berikut (Suhardjono, 2003: 247)

- a. Identitas pemohon, antara lain : Nama pemohon, Domisili, Bentuk Usaha, Jenis Usaha, dan sebagainya. Informasi mengenai identitas ini

dimaksudkan untuk melihat gambaran awal tentang penanggung jawab utama atas pengelolaan perusahaan, lokasi perusahaan serta keabsahan operasi perusahaan.

- b. Tujuan permohonan kredit, mencakup: jumlah kredit, obyek yang dibiayai, jangka waktu kredit, dan alasan kebutuhan kredit. Informasi mengenai tujuan kredit ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran bahwa kredit tersebut benar benar akan dipergunakan untuk membiyai usaha, bukan untuk hal hal yang bersifat spekulatif.
- c. Riwayat hubungan bisnis dengan bank mencakup: Saat mulai hubungan, bidang hubungan bisnis, dan jumlah total hubungan bisnis.

Analisa kredit yang dilakukan meliputi hal hal sebagai berikut:

(Suhardjono, 2003: 198)

1. Analisa Watak

Calon debitur Analisa watak bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan membayar/mengembalikan pinjaman dari pemohon, mencakup perilaku pemohon sebelum dan selama permohonan kredit diajukan. Sumber informasi yang dapat digunakan untuk menilai perilaku pemohon antara lain Reputasi bisnis diantara relasi relasinya, Riwayat perusahaan, Catatan criminal, Riwayat hidup atau riwayat pernikahan, Gaya hidup tingkat kerja sama selama proses analisis dilakukan akte pendirian badan usaha beserta perubahannya, serta catatan Internal Bank.

2. Analisa Kemampuan

Analisa kemampuan dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat

kemampuan debitur dalam mengembalikan kredit dari usaha yang akan dibiayai (*The first way out*), mencakup aspek manajemen (kemampuan mengelola perusahaan), aspek produksi (kemampuan memproduksi secara berkisinambungan, aspek pemasaran (kemampuan memasarkan hasil produksi) aspek personalia (kemampuan tenaga tenaga kerja dalam mendukung aktifitas perusahaan), dan aspek financial (kemampuan menghasilkan laba)

3. Analisa Modal

Analisa modal bertujuan untuk mengukur kemampuan pemohonan dalam menyediakan modal sendiri (*own share*) untuk mendukung pembiayaan usaha. Semakin besar kemampuan pemohon dalam menyediakan modal sendiri berarti semakin kecil porsi pembiayaan yang dilakukan Bank.

4. Analisa Kondisi/Prospek Usaha

Analisa Kondisi/ prospek usaha bertujuan untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang akan di biayai, yang meliputi siklus bisnis mulai dari bahan baku (pemasok), pengolahan, dan pemasaran (pembeli). Dalam pemasaran tersebut harus diperhatikan pula kondisi persaingan dari produagi Bank dalam setiap pemberian kredit apabila kredit yang diberikan menjadi masalah. Hal ini diperlukan karena bagaimanapun baik hasil analisis terhadap watak, kemampuan, permodalan, Kondisi/prospek usaha pemohon apabila kredit menjadi bennmasalah maka sumber pengembalian kredit hanya bersandar pada penjualan agunan.

Agunan akan dinilai oleh Bank untuk menentukan nilai pasar wajar (nilai pasar wajarnya saat di jual) dari agunan yang bersangkutan yang akan di ikat sebagai agunan kredit. Metode pendekatan yang biasanya dipergunakan dalam melakukan penilaian barang agunan adalah sebagai berikut :

a) Metode pendekatan data pasar

Metode pendekatan data pasar adalah melakukan penilaian terhadap barang agunan dengan cara menaksir nilai jual barang agunan tersebut. Dalam hal ini barang agunan harus mempunyai pasaran (artinya transaksi jual beli telah terjadi atas barang sejenis dan sebanding barang agunanyang sedang dinilai tersebut.

b) Metode pendekatan Biaya

Metode pendekatan biaya adalah melakukan penilaian terhadap barang agunan dengan cara menaksir biaya yang diperlukan untuk membangun suatu bangunan rumah/ pabrik atau biaya yang dikeluarkan untuk reproduksi barang tersebut dikurangi penyusutan, pendekatan biaya ini harus ditunjang dengan pendekatan data pasar dan pendekatan pendapatan.

c) Metode Pendekatan pendapatan

Metode pendekatan adalah melakukan penilaian terhadap barang agunan dengan cara menghitung pendapatan yang akan diperoleh selama barang tersebut barang agunan dengan cara menghitung pendapatan yang akan diperoleh selama barang tersebut dapat memperoleh keuntungan.

Hasil Analisa dituangkan dalam format laporan hasil analisa yang sekurang kurang kurangnya memuat hal hal berikut:

- a. Perlu diteliti Status kepemilikan dan asal usul kepemilikan disertai riwayat peralihan haknya serta diteliti keabsahannya pada instansi yang berwenang (untuk nasabah baru atau karena bukti kepemilikan yang diragukan)
- b. Dalam menilai jaminan harus diperhatikan nilai pasar wajar dan nilai likuidasi untuk menghindari over taksasi
- c. Apabila jaminan tersebut dulunya pernah di pakai sebagai jaminan pada Bank yang bersangkutan dan sekarang dijaminan kembali dengan nilai likuiditas yang berbeda/ lebih besar, maka perlu dijelaskan dasar dasar yang logis dari kenaikan nilai likuidasi tersebut.
- d. Perlu diteliti dalam penilaian apakah nilai jaminan sudah termasuk adanya evaluasi dan disertai dengan penjelasannya.
- e. Dalam hal jaminan telah di nilai oleh *appraisal company*, bank perlu mengadakan penilaian kembali terhadap hasil dari penilaian *appraisal company* tersebut.
- f. Dalam hal aktiva tetap perusahaan meningkat setelah adanya fasilitas kredit dari Bank, agar tambahan aktiva tetap tersebut dimasukkan sebagai komponen jaminan.

2.5. Teori pemberian kredit

Kredit berasal dari bahasa latin yaitu: "*credere/credo*" yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sedangkan bagi si pemberi kredit

artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang di pinjam pastila kembali.

Dalam dunia usaha pengusaha selalu berusaha mengembangkan usahanya, dimana didalam pengembangan usaha tersebut pengusaha di tuntut untuk meningkatkan produksinya. Sedangkan untuk mengembangkan usaha tersebut baik iti yang bergerak dalam memproduksi barang maupun perusahaan yang menghasilkan jasa tergantung pada jumlah modal yang ada, jumlah tenaga kerja, jumlah kekayaan alm yang tersedia, dan tingkat teknologi yang di gunakan dalam memproduksi barang dan jasa.

Tulang punggung kegiatan perbankan bila kita perhatikan neraca bank akan terlihat bahwa sisi aktiva bank di dominasi oleh besarnya jumlah kredit. Demikian juga bila kita mengamati sisi pendapatan bank akan ditemui bahwa pendapatan terbesar bank adalah dari pendapatan bunga dan kredit (Muchdarsyah, 2000:210)

Untuk memenuhi kebutuhan modal ini diperlukan kreditur, dimana kehadiran kreditur ini diharapkan sekali dalam dunia usaha karena salah satu pengusaha untuk memperoleh tambahan modal untuk pengembangan usahanya dri kreditur ini melalui bank.

Menurut(Undang Undang perbankan No 10 tahun 1998) pengertian kreditt adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pihak bank ^{dan} pihaklain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga dan bagi hasil.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2004: 103-105):

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa yang akan datang.

b. Kesepakatan

Kesepakatan merupakan suatu kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

c. Jangka waktu

Jangka waktu merupakan masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

d. Risiko

Risiko merupakan suatu kemungkinan tidak tertagihnya pinjaman atau macetnya pengembalian kredit.

e. Balas jasa

Akibat dari fasilitas pemberian kredit, Bank tentu ingin mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.

2.6. Tujuan dan Fungsi Pemberian kredit

A. Tujuan Pemberian Kredit menurut (Thomas suyatno,2007:14) Adapun Tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:

a) Membantu Nasabah

Tujuan adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana modal kerja. Dengan dana tersebut pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

b) Mencari keuntungan

Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut, yang hasilnya berbentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan administrasi kredit yang dibebankan pada nasabah.

c) Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik perekonomian, meningkat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

B. Fungsi pemberian kredit menurut Kasmir (2002: 97-98)

a) Untuk meningkatkan daya guna Uang

Dengan diberikannya Uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang dan jasa oleh penerima kredit.

b) Untuk meningkatkan Daya Guna Uang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi barang berguna atau bermanfaat

c) Meningkatkan Peredaran uang

Kredit juga dapat menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lain.

d) Mencari Keuntungan

Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang dan dalam dan dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya.

- e) Sebagai Stabilisatur Ekonomi
- f) Untuk Meningkatkan pemerataan Pendapatan
- g) Untuk Meningkatkan Kegiatan Berusaha
- h) Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional

Menurut Kasmir (2001: 76-78) Kredit dibedakan atas

A. Menurut jenis Kredit dilihat di lihat dari segi kegunaan Kredit

a). Kredit investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun usaha baru.

b). Kredit modal kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

B. Dilihat dari segi Tujuan Kredit

- a) Kredit komersil merupakan kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah dibidang perdagangan.
- b) Kredit konsumtif merupakan kredit yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif.
- c) Kredit produktif merupakan kredit yang diberikan oleh bank dalam rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga dapa memperlancar produksi.

C. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

- a) kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu selama-lamanya 1 tahun (kurang dari 1 tahun).
- b) Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun.
- c) Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun.

D. Dilihat dari sektor usaha

- a) Kredit Pertanian
- b) Kredit Industri
- c) Kredit Pertambangan
- d) Kredit Pendidikan
- e) Kredit Profesi
- f) Kredit Perumahan
- g) Dan Kredit Sektor lainnya
- h) Kredit Pertanian

2.7. Prinsip pemberian kredit dengan Analisa 5C dan Analisa 7P

Pinjaman usaha kecil lebih kompleks karena bank seringkali diminta mengambil resiko kredit. Dalam pemberian kredit membutuhkan suatu analisis terhadap usaha yang dilakukan debitur untuk menentukan suatu keputusan dalam pemberian kredit. Salah satu cara menilai kegiatan usaha debitur adalah dengan menggunakan prinsip-prinsip kredit pada aspek-aspek usaha debitur. Adapun

prinsip-prinsip yang digunakan adalah berupa analisis 5C dan 7P. Adapun 5C menurut (Gup and Kolari 2005: 263) tersebut adalah:

1. *Character*, sifat dan watak dari nasabah (kejujuran, tanggungjawab, integritas dan konsisten). Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, tercerminkan dari latar belakang debitur baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.
2. *Capacity*, kemampuan seseorang untuk menjalankan bisnis. Debitur perlu dianalisis apakah dia mampu memimpin dengan baik dan benar usahanya. Jika dia mampu memimpin usahanya, maka dia juga akan mampu untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian dan perusahaannya tetap berjalan.
3. *Capital*, kondisi keuangan dari nasabah (pendapatan bersihnya). Modal yang besar maka menunjukkan besarnya kemampuan debitur untuk melunasi kewajiban-kewajibannya.
4. *Collateral*, kekayaan yang dijanjikan untuk keamanan dalam transaksi kredit/anggunan. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jika terjadi kredit macet, maka agunan inilah yang digunakan untuk membayar kredit tersebut.
5. *Condition*, faktor luar (kondisi ekonomi) yang mengontrol perusahaan. Menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan dimasa akan datang

Sedangkan Penilaian dengan menggunakan analisis 7P adalah sebagai berikut menurut (Kuncoro, 2002 : 75)

- a. *Personality*, menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Sifat, kepribadian calon debitur dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit.
- b. *Party*, mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakter.
- c. *Purpose*, untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
- d. *Prospect*, untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
- e. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
- f. *Profitability*, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
- g. *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa barang atau orang atau jaminan asuransi.

Disamping menggunakan 5C dan 7P, dalam penilaian suatu kredit guna menilai layak atau tidak untuk diberikan kredit dapat dilakukan juga dengan menggunakan beberapa aspek, yaitu (Siamat, 2004 :107-110)

a. Aspek yuridis/hukum

Aspek ini menyangkut masalah legalitas badan usaha serta ijin-ijin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kred

b. Aspek pemasaran

Aspek ini menyangkut kemampuan daya beli masyarakat, keadaan kompetisi, kualitas produksi.

c. Aspek keuangan

Aspek ini menyangkut sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut.

d. Aspek teknis/operasi

Aspek ini menyangkut kelancaran produksi, kapasitas produksi, mesin-mesin dan peralatan, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku, lokasi, lay out ruangan.

e. Aspek manajemen

Aspek ini menyangkut struktur organisasi, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya.

f. Aspek sosial ekonomi Aspek ini menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat.

2.8. Teori perbankan

Sebagaimana diketahui bahwa Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang melakukan aktifitas peredaran uang. Menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1998, Pasal 2 yang dimaksud dengan Bank adalah Sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkan kembali dalam bentuk kredit, dan atau bentuk yang lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya Bank juga merupakan suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda benda berharga, membiayai perusahaan, dan lain sebagainya.

Sedangkan menurut Winardi dalam kamus ekonominya Bank adalah suatu lembaga untuk meminjamkan uang. Mengeluarkan uang kertas atau membantu menyimpan uang, ciri pokok Bank adalah penciptaan kredit. (Winardi, 2002 : 9)

Bank Menurut (Melayu Hasibuan , 2004: 2) Bank adalah Lembaga Keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator ekonomi serta dinamisator pertumbuhan perekonomian. Ditambah lagi bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial Intermediaries*) yang menyalurkan dana dari pihak yang berlebihan dana (*Surplus Unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana (*Defisit Unit*) pada waktu yang ditentukan. (Denda Wijaya, 2000 : 15).

Dari berbagai pernyataan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bank adalah salah satu badan usaha lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dengan tujuan memberikan kredit dan jasa jasa yang dibutuhkan masyarakat.

2.9. Fungsi Bank

Bank berfungsi sebagai *Financial Intermediasi* yang mana artinya menyalurkan dana dan menghimpun dana dari masyarakat dari *Unit Surplus* ke *Unit Defisit* pemindahan uang dari penabung kepada peminjam menurut (Rahmadi Usman, 2001 : 59).

Ada beberapa Fungsi bank sebagai Bank komersial atau Bank umum adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dan Menyalurkan Dana ke Masyarakat
2. Menyediakan Mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi
3. Menyediakan Dana untuk perdagangan Internasional.
4. Menyediakan jasa jasa pengolahan dana atau perwakilan amanat individu dan Masyarakat.
5. Memberikan pelayanan penyimpanan barang barang berharga.
6. Menawarkan jasa keuangan lainnya seperti cek, perjalanan wisata, Kartu Kredit, ATM dan lain sebagainya.
7. Serta menciptakan penyaluran Kredit Investasi

Bank adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang dalam kegiatan pokoknya mempunyai tiga fungsi yaitu sebagai berikut :

- a. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana, baik dalam pengembangan usaha maupun kepentingan pribadi.
- b. Mencrima dan Menyimpan dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk.

- c. Melaksanakan berbagai jasa yang diperlukan masyarakat dalam kegiatan perdagangan serta berbagai jenis lainnya dalam keuangan.

Beberapa tugas pokok bank adalah membantu pemerintah yaitu sebagai berikut :

- a. Mengatur, Menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
- b. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja

Adapun tujuan yang ingin dicapai bank melalui kebijaksanaan kredit mereka adalah (Sutojo, 2000: 18)

- a. Rasio perbandingan jumlah Deposito yang berhasil dikumpulkan dan jumlah kredit yang disalurkan
- b. Tingkat keuntungan yang ingin di capai.
- c. Pengendalian mutu kredit yang disalurkan termasuk tingkat toleransi terhadap kredit bermasalah.
- d. Meningkatkan mutu layanan kepada para debitur.

Menyesuaikan kebijaksanaan kredit terhadap ketentuan pemerintah

2.10. Karakteristik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan, WNI yang memiliki kriteria sebagaimana sebagai berikut (Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM) :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- d. Belum melakukan manajemen/catatan keuangan, sekalipun yang sederhana, atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya.
- e. Pengusaha atau SDM-nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD, dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai
- f. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam meningkatkan intermediasinya, karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki usaha non mikro, antara lain:

- a) Perputaran usaha (turn over) umumnya cepat. Kemampuannya menyerap dana yang relatif mahal dan dalam situasi krisis ekonomi, kegiatan usahanya tetap berjalan bahkan mampu berkembang, karena biaya manajemennya yang relatif rendah.
- b) Pada umumnya pelaku usaha mikro tekun, sederhana, serta dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang cepat

Usaha Kecil adalah usaha produktif yang berskala kecil yang mempunyai kriteria antara lain (Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008):

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Milik warga negara Indonesia (WNI).
- d. Pada umumnya sudah melakukan pembukuan manajemen keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha.
- e. SDMnya sudah lebih maju, rata-rata berpendidikan SMA dan sudah ada pengalaman usahanya.
- f. Pada umumnya sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
- g. Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, namun belum dapat membuat *business planning*, studi kelayakan dan proposal kredit kepada bank, sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultan/pendamping.
- h. Serta dapat menerima kredit dari bank diatas Rp.50.000.000,00 sampai Rp. 500.000.000,00.

Sementara usaha menengah adalah usaha perekonomian rakyat yang memiliki kriteria sebagai berikut (Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008):

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Milik warga negara Indonesia (WNI).
- d. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih moderen, dengan pembagian tugas yang jelas antara bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.
- e. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
- f. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan. Sudah ada program JAMSOSTEK dan pemeliharaan kesehatan.
- g. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin gangguan, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dan lain-lain.
- h. Telah sering bermitra dan memanfaatkan pendanaan yang ada di bank
- i. SDM nya sudah lebih meningkat, banyak pengguna sarjana sebagai manajer.
- j. Serta dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp 500.000.000,00 sampai dengan Rp 5.000.000.000,00.

BPS juga membagi jenis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

berdasarkan jumlah pekerja yaitu:

- a. Perorangan, dengan jumlah tenaga kerja dibawah 4 orang termasuk tenaga kerja yang tidak dibayar.
- b. Usaha kecil, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 5 sampai dengan 19 orang.
- c. Usaha menengah dengan tenaga kerja sebanyak 20 sampai dengan 99 orang.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terdiri dari:

- a. Perorangan (pengrajin, industri rumah tangga, petani, nelayan, perambah hutan dan jasa-jasa).
- b. Badan usaha (Fa, Cv, PT, dan koperasi).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Indonesia memiliki ciri khas tertentu yang membedakan dengan usaha besar maupun kecil dengan negara lain. Ada beberapa karakteristik yang menjadi ciri khas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), antara lain:

- a. Mempunyai usaha yang kecil baik modal, penggunaan tenaga kerja maupun orientasi pasar.
- b. Status usaha milik pribadi.
- c. Sumber tenaga kerja berasal dari lingkungan sosial budaya (etnis, geografis) yang direkrut melalui pola pemagangan atau pihak ketiga.
- d. Banyak berlokasi di pedesaan, kota-kota kecil atau daerah pinggiran kota besar.
- e. Pola kerja sering kali part time atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan ekonomi lainnya.

- f. Izin usaha sering kali tidak dimiliki dan persyaratan usaha tidak dipenuhi.
- g. Strategi perusahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang strategis berubah secara cepat.
- h. Memiliki kemampuan terbatas dalam mengadopsi teknologi, pengelolaan usaha dan administrasinya sederhana.
- i. Struktur permodalan sangat terbatas dan kekurangan modal kerja serta sangat tergantung terhadap sumber modal sendiri dan lingkungan pribadi.

Ada dua sumber kekuatan yang membantu bisnis Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Untuk tumbuh berkembang adalah sistem pelatihan nasional untuk meningkatkan keterampilan seni dan perdagangan, yang memungkinkan level tinggi mobilitas tenaga kerja. Kepercayaan yang meluas sebagai perantara biro perdagangan internasional. Perusahaan kecil menggunakan agen untuk mendapatkan hubungan lebih jauh bagi pasar luar negeri sementara mereka sering kali merupakan agen lokal bagi satu atau sejumlah perusahaan luar negeri.

2.11. Permasalahan Perkembangan UMKM

Walaupun secara umum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kedudukan yang sangat potensial pada perekonomian nasional. Dalam perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih tetap menghadapi berbagai permasalahan, baik eksternal maupun internal yang memerlukan kepedulian semua pihak serta kebijaksanaan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). (Djunaidi, 2000: 47)

Permasalahan Internal berkaitan dengan faktor dari Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) itu sendiri, terutama yang menyangkut kendala-kendala lain yang lebih spesifik, yaitu:

- a. Rendahnya Kualitas sumber Daya manusia pada sektor usaha kecil dan menengah.
- b. Lemahnya Organisasi dan Manajemen
- c. Terbatasnya akses pembiayaan
- d. Terbatasnya jaringan usaha

Sedangkan permasalahan eksternal, meliputi:

- a. Iklim usaha yang kurang kondusif
- b. Persaingan yang tidak seimbang
- c. Kondisi perbankan yang belum sehat
- d. Terbatasnya jaringan usaha

2.12. Strategi pengembangan UMKM

Agar UMKM benar-benar bisa menjadi pilar utama perekonomian, peningkatan kredit UMKM akan efektif paling tidak harus disertai strategi yang mencakup:

- a. Penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif
- b. Peningkatan kemampuan kewirausahaan
- c. Peningkatan dalam jumlah dan kemudahan persyaratan dalam perkreditan perbankan
- d. Pengembangan perangkat penunjang bagi peningkatan pembiayaan seperti penjaminan kredit
- e. Meningkatkan lembaga keuangan mikro
- f. Meningkatkan layanan KSP/USP koperasi
- g. Peningkatan lembaga keuangan sekunder
- h. Peningkatan jaringan informasi baik pusat maupun daerah

i. Pengembangan multi finance

Pemberdayaan UMKM mengandung pengertian memihak (targeting), mempersiapkan (enabling), dan melindungi (protecting). Untuk itu diperlukan mitra yang partisipatif dalam memberikan investasi. Dimana mitra yang partisipatif salah satunya adalah lembaga keuangan, yang menyediakan fasilitas kredit bagi usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Cornelis, 2005;82-83).

2.13. Pentingnya Modal Bagi perkembangan UMKM

Perkembangan merupakan prinsip prudentil dalam penyahuran kreditnya, sehingga karena beberapa kelemahan yang dimiliki oleh UMKM, menyebabkan UMKM tidak dapat memenuhi persyaratan pengajuan kredit perbankan meskipun Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) memiliki prospek, pentingnya modal bagi UMKM mengharuskan lembaga koperasi dan UKM melakukan terobosan.

- a. Dalam kaitannya dengan pemenuhan syarat penyediaan jaminan kredit, departemen koperasi dan UKM bekerja sama dengan badan pertahanan nasional telah melakukan upaya sertifikasi tanah untuk mendukung legalitas tersebut diharapkan usaha UMKM yang layak dapat memperoleh bantuan pembiayaan dari perbankan.
- b. Departemen Koperasi dan UKM mempersiapkan Rancangan Undang-Undang penjaminan kredit, dan telah menyediakan dana penjaminan dengan maksimum penjaminan sebesar 70% dari plafon kredit.
- c. Dalam kaitannya dengan upaya memperkuat permodalan UMKM, Departemen koperasi dan UKM melakukan pendekatan pengembangan

permodalan usaha UMKM pada sentra/klaster yang belum tersedia pembiayaannya secara memadai dari perbankan.

- d. Sebagai salah satu upaya untuk memperluas akses koperasi dan UMKM, bekerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan non bank, melakukan program kemitraan (linkage program) untuk pembiayaan disektor unggulan.
- e. Pemerintah bekerja sama dengan BUMN menyalurkan kredit UMKM dengan sumber dana berasal dari penyisihan laba BUMN
- f. Pemerintah melakukan program peningkatan modal lembaga keuangan mikro pada tingkat kabupaten/kota, khususnya untuk daerah-daerah yang memiliki keterbatasan ketersediaan lembaga pembiayaan (Bank Indonesia, 2005: 59-61).

Pembiayaan UMKM melalui kredit perbankan secara keseluruhan mencerminkan tujuan yang konsisten bagi UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil dan sehat. Untuk mencapai tujuan tersebut modal sangat dibutuhkan bagi pengusaha UMKM dengan pemasaran, pengemasan, manajemen dan teknologi informasi tentang pasar, dimana dalam pemasaran produk pengusaha UMKM masih berorientasi pada dasar dalam negeri. Hal ini terjadi karena produk yang dihasilkan dan teknologi yang digunakan masih berdasarkan pada teknologi sederhana yang padat karya, sehingga belum memiliki daya kompetisi di pasar internasional. UMKM dianggap sebagai ekonomi rakyat atau tulang punggung indonesia, yang mana untuk perkembangan usahanya harus diberi perhatian dan bantuan modal. Keberadaan

UMKM sebagai masalah ekonomi Indonesia biasanya menjadi argumentasi untuk memberi bantuan. Dengan kata lain pentingnya modal dengan UMKM menjadi alasan bagi pemerintah untuk melakukan atau membuat program pemberian bantuan dalam permodalan, padahal pertumbuhan UMKM ialah akses negatif krisis demi mempertahankan hidup atau sekedar survive (Dalam Ritonga, 2006).

2.14. Keunggulan perkembangan UMKM

Keberhasilan UMKM ditunjuk oleh peningkatan kemampuan teknologi dan SDM pada UMKM tersebut. Yang menjadi alat ukur keberhasilan kebijakan dalam perkembangan UMKM adalah bukan jumlah UMKM yang meningkat setiap tahun, tetapi jumlah pengembangan UMKM yang dalam periode tertentu berhasil menembus pasar ekspor, atau meningkatkan pangsa eksportnya atau berhasil melakukan transformasi dari produk sederhana ke produk rekayasa yang lebih kompleks, atau berhasil membentuk kemitraan dalam proses produksi dengan perusahaan asing (Saleh, 2000: 75), serta sejauh mana perusahaan tersebut mengelola dana dan kemampuan dalam mengembalikan pinjaman kredit tersebut.

Pokok permasalahan UMKM tidak sekedar pada ketahanannya saja menghadapi krisis, namun lebih pada suatu kenyataan akan tingginya tingkat kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan. Hal ini menjadi kelebihan UMKM adalah produk yang dihasilkan sebagian besar menghasilkan produk yang selalu dibutuhkan masyarakat, sehingga tanpa produksi sepanjang ada kepastian usaha maka akan tetap eksis. Perlindungan terhadap UMKM terjadi

terhadapsaingan yang timbul dari usaha-usaha yang berskala besar, namun berada pada pasar yang sama dengan UMKM.

Jenis produk yang menjadi keunggulan dan sering tanpak pada pameran prduk-produk UMKM, dimana produk-produk yang dipamerkan dari waktu ke waktu hanya produk-produk handicraff. Oleh karena itu kebijakan ekspor nasional untuk mendorong pertumbuhan UMKM harus mengutamakan dua hal yaitu perpindahan secara bertahap dari ekspor manufacture padat karya dan teknologi sederhana ke produk-produk manufakture berteknologi menengah dan atas, dan peningkatan kontribusi UMKM terhadap ekspor totla manufacure, tidak hanya dari teknologi bawah tetapi juga pada tingkat menengah dan atas. (Bank indonesia, 2005: 64-65).

Terobosan yang dilakukan bank indonesia, pemerintah dan DPR untuk memberdayakan UMKM adalah (Soetanto, 2004: 95-96):

- a. Yang dilakukan bank indonesia
 - a) Kelonggaran kolektibilitas khusus untuk kredit UMKM, didasarkan atas kemampuan debitur membayar cicilan
 - b) Menetapkan batas maksimum pemberian kredit sebesar 15% untuk petani plasma, sebelumnya 20%.
- b. Yang dilakukan pemerintah
 1. Memberikan subsidi suku bunga UMKM sekitar 4% dari dana penggunaan subsidi BBM sebesar Rp 250.000.000.000,00.
 2. Kredit layak tanpa agunan dengan jaminan yang dananya dikumpulkan dari PUKK BUMN.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Teluk Kuantan yang berlokasi di jl. Sudirman No. 44 Teluk kuantan. Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan januari 2011 sampai dengan selesai.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Data primer berupa pengumpulan formasi yang diperoleh dalam survey dengan metode Wawancara dan menggunakan kuesioner terstruktur yang diberikan kepada nasabah yang menjadi responden terpilih. Data yang diambil adalah data pemberian kredit dan perkembangan UMKM
- b. Data Sekunder data yang penulis peroleh dari PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Teluk Kuantan berupa informasi yang ada kaitannya dengan penelitian ini yang ada kaitannya dengan penelitian ini, seperti Sejarah singkat PT. Bank Riau Kepri dan Struktur Organisasinya.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek , subjek, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2003: 90)

Adapun yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah 100 orang nasabah UMKM pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan periode 2006-2010.

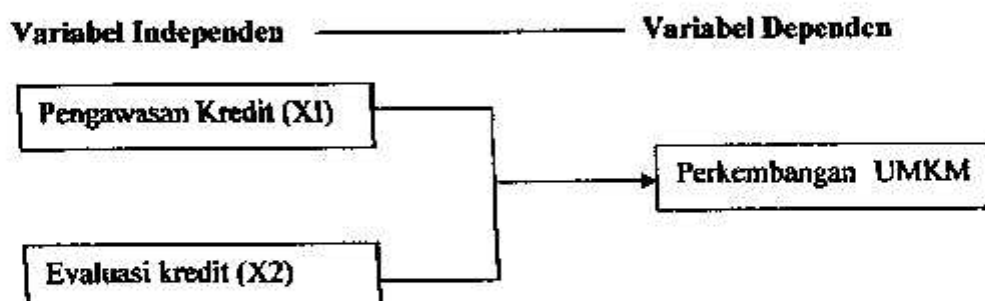
Sampel adalah bagian dari jumlah atau karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Adapun sampel yang diambil adalah sebanyak 25% dari total populasi yaitu 25 nasabah dengan metode *purposive sampling*, atau sampel yang diambil berdasarkan kriteria tertentu.

Kriteria pengambilan ditentukan sebagai berikut:

1. Nasabah yang menerima jumlah pinjaman kredit mulai dari Rp 5.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00
2. Nasabah yang usahanya bergerak di sektor sektor perdagangan, industry, Perkebunan, Pengangkutan serta jasa Dunia Usaha
3. Nasabah tersebut berdomisili di Teluk Kuantan
4. Kegiatan usahanya berada disekitar pasar Teluk Kuantan
5. Mempunyai jangka waktu kredit selama lima tahun yaitu dari tahun 2006 s.d 2010

3.4. Variabel Penelitian

Adapun kerangka konseptual penelitian adalah sebagai berikut:



Berdasarkan Konseptual di atas dapat dijelaskan bahwa: Pengawasan kredit (X1) dan Evaluasi Kredit (X2) Berpengaruh terhadap perkembangan UMKM (Y).

3.5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan Data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan tata cara berikut:

1. Wawancara yaitu: Berupa Tanya jawab langsung dengan karyawan perusahaan yang bersangkutan atau berkaitan dengan masalah yang dibahas seperti bagian kredit pada khususnya dengan mempersiapkan pertanyaan yang diperlukan.
2. Kuesioner yaitu: dengan mengajukan suatu daftar pertanyaan kepada responden yang menjadi sasaran pertanyaan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan agar memperoleh data yang lebih lengkap.

3.6. Instrumen Penelitian

a. Uji kualitas Data (Instrumen)

Instrumen Data merupakan media dalam pengumpulan data, sehingga kuesioner dikatakan reliable jika jawaban responden konsisten bila di ajukan pertanyaan yang sama dalam waktu yang berbeda. Untuk mengetahui reliabilitas satu kuesioner yang merupakan indikator dan variabel penelitian, maka diperlukan uji reabilitas dan validitas.

b. Validitas (Test of Validity)

Validitas alat ukur sama pentingnya dengan reliabilitas alat ukur itu sendiri, ini artinya bahwa alat ukur haruslah memiliki akurasi yang baik terutama alat ukur tersebut digunakan sebagai Validitas akan meningkatkan bobot

kebenaran data yang diinginkan peneliti. Untuk mencapai tingkat validitas instrument penelitian, maka alat ukur yang dipakai dalam instrument juga harus memiliki tingkat validitas yang baik.

Tujuan dari validitas adalah untuk melihat seberapa jauh butir butir variabel yang diukur menyatu satu sama lainnya. Suatu instrumen dinyatakan valid apabila nilai r hasil $r > r$ tabel, artinya alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data valid.

c. Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu gejala atau kejadian. Pengujian Reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah hasil jawaban dari kuesioner oleh responden benar-benar stabil dalam mengukur satu gejala atau kejadian. Semakin tinggi reabilitas suatu alat pengukur, semakin stabil pula alat pengukur tersebut dan sebaliknya jika reabilitas alat pengukur tersebut rendah maka alat tersebut tidak stabil dalam mengukur suatu gejala. Instrument yang reliable adalah instrument yang digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Dalam penelitian ini pengukuran reabilitas menggunakan ujicronbach alfa (α) yaitu jika $\alpha > 0,60$ maka dikatakan reliable.

3.7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif dan kuantitatif. Analisa Deskriptif yaitu digunakan untuk mengetahui tanggapan responden dan hasil kuesioner yang disebarkan tentang pengawasan dan evaluasi pemberian kredit serta perkembangan UMKM. Sedangkan analisa kuantitatif yaitu dengan analisa regresi linier dengan rumus (Hartono, 2004 : 140)

$$Y = a + bx$$

Dimana: a = Nilai Intercept (Konstanta)

b= Koefisien Arah Regresi

X= Variabel Bebas

Y = Variabel Terikat

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

Dimana: Y = Perkembangan UMKM

X₁ = Pengawasan Kredit

X₂ = Evaluasi pemberian Kredit

a = Konstanta

b_{1,2,...} = Koefisien Regresi (Parsial)

3.8. Analisis Koefisien berganda (uji R)

Uji R digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) mempunyai hubungan dengan variabel terikat (Y), dari nilai R dapat diketahui bahwa variabel bebas secara bersama sama mempunyai pengaruh terhadap/ terhadap variabel terikat

3.9. Koefisien Determinasi berganda (R²/Square

Analisis determinasi dalam regresi bergandadigunakan untuk mengetahui seberapa besarpengaruh variabel X terhadap variabel Y.

3.10. Uji F (F Test)

Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel bebas secara bersama sama (Simultan) mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Untuk membuktikan tersebut dilakukan uji F.

3.11. Uji t (Uji parsial)

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan apakah variabel independen yang terdapat dalam persamaan secara individu berpengaruh terhadap nilai variabel Dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan tabel pada tingkat signifikan 5% dan derajat kebebasan $df = n-k-1$.

Selanjutnya data tersebut diberi skor sehingga menjadi suatu data kuantitatif. Dalam penulisan ini untuk menentukan nilai jawaban setiap pertanyaan maka penulis menggunakan skala likert yaitu masing masing jawaban responden diberi skor 1 sampai 5 pada penelitian. (Sugiono, 2003 : 107)

Oleh sebab itu, untuk melihat seberapa besar pengaruh pengawasan dan Evaluasi pemberian Kredit terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka dilakukan teknik pengukuran data dengan menyatakan jawaban dengan bilangan dan memberi bilangan dengan serta memberikan skor persentase pada setiap jenis jawaban questioner, jumlah skor, kemudian disusun dalam bentuk 5 (lima) interval dan skala yang sama (skala likert). Dimana:

- 1) Apabila Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1 (satu)
- 2) Apabila Jawaban Tidak Setuju (TS) diberi skor 2 (dua)
- 3) Apabila Jawaban Ragu (R) di beri skor 3 (tiga)
- 4) Apabila Jawaban Setuju (S) diberi skor 4 (empat)
- 5) Apabila Jawaban Sangat Setuju (ST) diberi skor 5 (lima)

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN SEJARAH SINGKAT PT.BANK RIAU KEPRI CABANG TELUK KUANTAN

4.1. Sejarah singkat PT. Bank Riau Kepri

Bank Riau Kepri atau Bank Pembangunan daerah (BPD) merupakan kelanjutan kegiatan usaha dari PT. BAPERI (PT. Bank Pembangunan Daerah Riau) yang didirikan berdasarkan akta notaris Syawal Sutandi atas no 1 Tanggal 2 Agustus 1961, dan izin menteri keuangan Republik Indonesia Nomor BUM 9-4-1945 Tanggal 12-08-1961. Selanjutnya dengan surat keputusan Gubernur KDH Tk. 1 Riau No. 51/1v/1966 Tanggal 1 April 1966 dinyatakan berakhirnya segala kegiatan PT. BAPERI, Seluruh Aktiva dan Pasiva PT. BAPERI dileburkan ke dalam Bank Pembangunan Daerah Riau yang Disesuaikan dengan Undang Undang No. 13 Tahun 1967 tentang Bank pembangunan Daerah. Terhitung tanggal 1 April 1966 secara resmi Bank Pembangunan Daerah Riau dimulai dengan status sebagai Bank milik pemerintah daerah Riau.

Dengan berbagai perubahan dan perkembangan kegiatan bank sejak tahun 1975 status pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau disesuaikan dengan peraturan daerah Provinsi Daerah tingkat 1 Riau No. 10 Tahun 1975, yang kemudian diatur kembali dengan peraturan Daerah Tingkat 1 Riau No. 18 Tahun 1986 berdasarkan Undang Undang No. 13 Tahun 1962.

Untuk terakhir kalinya status pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau di atur dan disesuaikan dengan peraturan Daerah (Perda) No. 14 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Riau berdasarkan Undang Undang Nomor No. 7

Tahun 1992 tentang perbankan. Kemudian dengan adanya Undang Undang No. 10 Tahun 1998 beserta Era Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999 serta Undang Undang perimbangan Keuangan Daerah No. 22 Tahun 1999 serta Undang Undang Perimbangan Keuangan Daerah No. 25, Tahun 1999 maka Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau melalui peraturan Daerah No. 10 Tahun 2002 Tanggal 26 Agustus 2002 serta dengan akta pendirian Perseroan Terbatas No 36 yang telah disahkan oleh menteri kehakiman dan HAM dengan Surat Keputusan No. C-19851.HT.01.TH. 2003 Tanggal 5 Mei 2003 dan persetujuan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 5/30/KEP.DGS/2003 Tanggal 22 juli 2003 melakukan perubahan status badan hukum dari perusahaan Daerah (PD) menjadi perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau Berdasarkan Akta Notaris Muhammad Dahad Daud Umar, SH Nomor 36 Tanggal 18 Januari 2003 tentang berdirinya PT. Bank Pembangunan Daerah Riau yang disingkat PT. Bank Riau.

Pada tanggal 24 April 2010, dihadapan notaries Ferri Baki, SH Bank Riau berubah nama menjadi Bank Riau Kepri dan telah mendapat pengesahan dari kementerian hukum dan HAM pada tanggal 22 juli 2010, serta izin dari Bank Indonesia No. 12/59/KEP/GBI/2010 tanggal 23 September 2010.

4.2. Maksud dan Tujuan Pendirian

Bank pembangunan Daerah Riau (BPD) Riau didirikan dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pengembangan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah disebutkan tugas dan usaha Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau adalah sebagai berikut:

1. Bank merupakan kelengkapan otonomi Daerah di bidang keuangan/ perbankan dan menjalankan usahanya sebagai bank umum sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Untuk mencapai Maksud dan Tujuan pendirian , Bank menyelenggarakan usaha usaha antara lain:
 - a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, Giro, Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, Tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 - b. Memberi kredit
 - c. Menerbitkan Surat Pengakuan Hutang
 - d. Membeli, Menjual atau Menjamin baik atas resiko sendiri untuk kepentingan dan atas permintaan nasabah berupa:
 - a) Surat surat wesel termasuk yang di akseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - b) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - c) Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah.
 - d) Sertifikat bank Indonesia (SBI).

- e) Obligasi
 - f) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
 - g) Insurment surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasaba.
 - f. Menempatkan dana pada peminjam atau meminjam dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat,sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk,cek dan sarana lainnya.
 - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
 - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
 - i. Menyediakan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak perjanjian
3. Sebagai alat kelengkapan otonomi daerah,bank mempunyai tugas antara lain:
 - a. sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan didaerah.
 - b. Sebagai pemegang kas daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah.
 - c. Sebgai salah satu sumber pendapatan daerah.

Selain fungsi dan tugas yang telah disebutkan diatas,PT.Bank Riau juga mempunyai visi misi serta Coorporate image yaitu:

- I. Visi

Sebagai perusahaan perbankan yang mampu berkembang dan terkemuka di daerah, memiliki manajemen yang profesional dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah sehingga dapat memberdayakan perekonomian rakyat.

2. Misi

- Sebagai bank yang sehat, elit dan merakyat.
- Sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi rakyat.
- Sebagai pengolah danah pemerintah daerah.
- Sebagai Pembina, pengembang dan pendamping usaha kecil, menengah dan besar.

3. Corporate image

“Tumbuh Kembangkan Usaha”

“The Spirit to Grow”.

4.3. Fungsi dan Tugas

Berdasarkan peraturan daerah No. 14 Tahun 1992 disebutkan bahwa maksud dan tujuan pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan dan perekonomian dan Pembangunan Daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dengan menyediakan pembiayaan Pembangunan, penghimpunan dana masyarakat, serta melaksanakan kegiatan perbankan pada umumnya berdasarkan asas ekonomi perusahaan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan maksud dan pendirian

tersebut, PT. Bank Riau Cabang Pembantu (CAPEM) Taluk kuantan berfungsi antara lain:

1. Sebagai sumber pembiayaan Pembangunan Daerah.
2. Sebagai penggerak Pembangunan Daerah.
3. Sebagai pemegang kas Daerah
4. Sebagai sumber pendapatan Daerah

Selain itu PT. Bank Riau Juga mempunyai misi ideal yaitu: *Agent Of Development*, yaitu sebagai perantara pembiayaan pembangunan di sector keuangan. Dalam mewujudkan maksud dan tujuan pendirian sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang pokok pokok perbankan peraturan operasional Bank Pembangunan Daerah Riau adalah sebagai berikut:

1. Sebagai *Agent of Development bank*, PT. Bank Riau diarahkan oleh pemerintah Daerah antara lain:
 - a. Sebagai sumber pembiayaan pembangunan Daerah
 - b. Sebagai penggerak pembangunan Daerah
 - c. Sebagai sumber pendapatan Daerah
 - d. Sebagai pemegang kas Daerah
 - e. Menghimpun Dana jangka menengah dan jangka panjang terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan
2. Sebagai Bank umum

Menerima simpanan terutama dalam bentuk tabungan, Deposito, Giro dan kegiatan lainnya serta pemberian kredit dalam bentuk usaha Kecil menengah dan besar.

3. Melaksanakan usaha bank lainnya selagi tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, terutama dalam melaksanakan jasa perbankan seperti *Transfer Uang jaminan bank* atau *referensi bank*.

4.4. Struktur Organisasi PT. Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan

Setiap badan organisasi atau perusahaan mempunyai tujuan atau kehendak yang telah ditetapkan jauh sebelum proses perencanaan. Langkah utama dalam mencapai tujuan dimaksud adalah merencanakan atau merumuskan struktur organisasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi serta mencerminkan unsur kejelasan yang fleksibel. Hal ini dimaksudkan karena struktur organisasi merupakan alat dan kerangka dasar yang membantu organisasi dalam mencapai tujuan.

Proses perencanaan struktur organisasi ini menurut gambaran, pengaturan dan pengklasifikasian tugas, tanggung jawab dan wewenang personal serta bagian dan seksi yang ada pada organisasi. Disamping itu didalam struktur harus pula menggambarkan jaringan koordinasi antara fungsi dan seluruh aktivitas organisasi yang satu dengan yang lainnya saling terkait.

Dengan demikian struktur organisasi yang menata proses dan mekanisme kerja sekaligus memungkinkan pemilihan strategi dan kebijaksanaan yang selaras dan upaya mencapai tujuan organisasi secara lebih sehat dan efektif.

Dengan tersusunnya struktur secara fleksibel dan tegas, maka tiap bagian dan seksi yang ada pada perusahaan siap melaksanakan tindak lanjut yang terkoordinasi dalam mencapai hasil kerja tahapan yang menopang tujuan akhir.

Struktur Organisasi PT. Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan

1. Pimpinan Cabang

Bertugas menetapkan tujuan dan kebijaksanaan. Menyusun rencana strategi pengembangan usaha sesuai dengan kemampuan dan anggaran yang tersedia atau yang telah direncanakan oleh PT. Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan, mengawasi dan menilai kegiatan kerja staf-stafnya.

2. KIN (Kontrol Intern)

Mengawasi dan menilai kinerja pimpinan cabang dan staf-staf karyawan PT. Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan.

3. Pinsi Operasional

Pinsi operasional yaitu kepala bagian yang bertanggung jawab atas operasional sebuah Bank pada Bank Riau Kepri kantor Cabang Teluk Kuantan.

4. Pinsi Pemasaran

Pinsi pemasaran yaitu kepala bagian yang menangani masalah kredit, sekaligus bertanggung jawab atas kredit yang telah disalurkan kepada nasabah dalam penagihan kredit apabila ada penunggakan pembayaran kredit.

5. Pinsi Pelayanan Nasabah

Pinsi pelayanan nasabah yaitu kepala bagian yang bertanggung jawab atas fisik uang dan dalam melayani nasabah PT. Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan.

6. Pelaksana

Pelaksan terdiri dari beberapa karyawan yang merupakan bawahan dari pinsi yang mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan bagiannya masing-masing dan bertanggung jawab kepinsi pelaksana. Ini terdiri dari:

1. Pelaksana Costumer Service yaitu : Bertugas melayani nasabah dalam memberikan informasi dan lainnya
2. Pelaksana Teller yaitu : Petugas Ront Office yang bertugas menerima setoran, penarikan dan perintah.
3. Pelaksana kredit KAG yaitu: Pelaksana yang bertugas mencrima permohonan kredit dari pegawai negri sampai mencairkan kredit tersebut.
4. Pelaksana kredit umum yaitu: Pelaksana yang bertugas menerima kredit selain KAG seperti kredit kerakyatan, komersil dan lain sehgainya dan laporan atas kredit yang telah disalurkan.
5. Pelaksan administrasi kredit yaitu: Bertugas memasukkan data data nasabah yang mengambil kredit di PT. Bank Riau Cabang Teluk Kuantan.

6. Pelaksana pembukuan yaitu: Bertugas mengecek transaksi yang terjadi dan membuat laporan dari semua kegiatan di PT. Bank Riau Cabang Teluk Kuantan.
7. Pelaksana transfer yaitu: Bagian yang bertugas memproses pengiriman uang dan menerima kiriman yang ditujukan kepada penerima, baik itu melalui *clearing*, dan sebagainya.
8. Pelaksana *Over-Booking* yaitu: Hampir sama dengan Teller, hanya saja disini tidak berlaku tunai melainkan pemindah bukuan.
9. Pelaksana umum yaitu: Bagian yang menangani perlengkapan kantor, biaya dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan karyawan.
10. Pelaksana penagihan yaitu: Bagian yang bertugas menagih kredit apabila ada nasabah yang nunggak atau terlambat menyetor tagihan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan bab ini meliputi hasil penelitian untuk mengukur variabel dependen yaitu perkembangan UMKM atas variabel independen yang meliputi pengawasan dan evaluasi. Hasil penelitian ini meliputi gambaran umum responden, uji kualitas data, dan uji parsial.

5.1. Hasil Pengumpulan Data dan Demografi Responden

5.1.1. Hasil Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian ini diambil dengan cara penyebaran kuesioner dan wawancara pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Taluk Kuantan. Penyebaran kuesioner dimulai pada tanggal 7 mei 2011 dan tanggal pengumpulan 10 Mai 2011. Total kuesioner yang dibagikan adalah 25 buah. Kuesioner yang dapat dikumpulkan atau kembali yaitu sebanyak 24 kuesioner, semua kuesioner yang terkumpul dapat memenuhi syarat untuk diolah yaitu 24 kuesioner. Tingkat pengumpulan kuesioner dapat dilihat pada tabel IV.

Tabel V.1 Tingkat Pengumpulan Kuesioner

KETERANGAN	JUMLAH	PERSENTASE
Total kuesioner yang disebarkan	25	100%
Total kuesioner yang terkumpul kembali	24	96%
Total kuesioner yang tidak terkumpul	1	4%
Totak kuesioner yang dapat diolah	24	96%

Berdasarkan tabel IV.1 dapat dijelaskan bahwa penelitian menyebarkan 25 kuesioner. Kuesioner yang terkumpul kembali sebanyak 24 kuesioner atau 96%. Sedangkan kuesioner yang tidak terkumpul kembali adalah 1 kuesioner atau 4%. Jadi, total kuesioner yang dapat diolah dari jumlah keseluruhan kuesioner yang disebarkan adalah 24 kuesioner atau 96%.

Table V.2 Data Demografi Responden

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Pendidikan		
S2		
S1	9	36 %
D3	10	40 %
SMU	5	20%
SLTP		
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	15	60 %
Perempuan	9	36 %

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel IV.2 diatas, dapat dilihat bahwa persentase data demografi responden berdasarkan pendidikan dalam penelitian ini adalah 9 responden berpendidikan S1 atau 36%, 10 responden berpendidikan D3 atau 40%, serta 5 responden berpendidikan SMU atau 20%. Jenis kelamin dari para responden untuk laki-laki sebanyak 15 orang atau 60%, perempuan sebanyak 9 orang atau 36%.

5.2. Analisis Pengawasan Kredit.

Pengawasan kredit adalah kegiatan pengawasan/ monitoring terhadap tahapan tahapan proses pemberian kredit, Pengawasan kredit dilakukan sejak permohonan kredit sampai dengan pelunasan atau penyelesaian kredit. Pengawasan kredit dapat dilakukan oleh pihak Eksternal dan pihak Internal. Pengawasan Eksternal dilakukan oleh Bank Indonesia, Masyarakat, Legislatif (DPR) Sedangkan pengawasan Internal dilakukan oleh tiga pihak yaitu : Pihak atasan langsung, pejabat lain yang berbeda fungsi dan dan pihak satuan kerja Audit internal.

Pengawasan kredit bertujuan untuk memastikan apakah pengelolaan, kredit, aset/kekayaan bank telah dilakukan dengan baik sehingga tidak timbul resiko resiko kredit yang di akibatkan penyimpangan baik oleh debitur maupun intern Bank. Obyek pengawasan Bank mencakup semua pejabat Bank yang terkait dengan bidang perkreditan dan semua jenis fasilitas kredit yang diberikan termasuk kredit kepada pihak pihak yang terkait dengan Bank.

Apabila asset atau kekayaan bank digunakan sesuai dengan koridor yang ditentukan maka resiko resiko yang diakibatkan karena penyimpangan ata lainnya dapat dicegah dan aktifitas bisa berjalan dengan baik, baik itu pada usaha nasabah maupun pada pihak interen bank itu sendiri.

Berikut ini penulis akan menguraikan tanggapan responden terhadap pengawasan kredit yang diwakilkan oleh 5 pertanyaan berhubungan dengan pengawasan kredit dan pengaruh dari pengawasan kredit tersebut.

Table V.3 Rekapitulasi tanggapan responden terhadap pengawasan kredit.

No	Kategori					Jumlah
	Sangat Setuju	Setuju	Ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	
1	8 (33,33%)	16 (66,67%)	-	-	-	24 (100%)
2	8 (33,33%)	16 (66,67%)	-	-	-	24 (100%)
3	7 (29,17%)	15 (62,5%)	-	-	-	24 (100%)
4	8 (33,33%)	16 (66,67%)	-	-	-	24 (100%)
5	6 (24%)	12 (50%)	4 (16,67%)	2 (8,33%)	-	24 (100%)
Rata-rata	7 (29,17%)	15 (62,5%)	1,5 (6,25%)	0,5 (2,08%)	-	24 (100%)

Sumber : data olahan.

Dari tabel diatas dapat diketahui rata-rata tanggapan responden terhadap pengawasan kredit sebagai berikut : 7 (29,17%) menyatakan sangat setuju, 15 (62,5%) menyatakan setuju, 1 (6,25%) menyatakan ragu dan 0,5 (2,08%) menyatakan tidak setuju. Maka dapat disimpulkan tanggapan responden terhadap pengawasan kredit adalah setuju.

5.3. Analisis Evaluasi Kredit

Evaluasi pemberian kredit adalah analisa terhadap pemberian kredit yang mencakup informasi sebagai berikut:

- a. Identitas pemohon, antara lain : Nama pemohon, Domisili, Bentuk Usaha, Jenis Usaha, dan sebagainya. Informasi mengenai identitas ini dimaksudkan untuk melihat gambaran awal tentang penanggung jawab utama atas pengelolaan perusahaan, lokasi perusahaan serta keabsahan operasi perusahaan.
- b. Tujuan permohonan kredit, mencakup: jumlah kredit, obyek yang dibiayai, jangka waktu kredit, dan alasan kebutuhan kredit. Informasi mengenai tujuan kredit ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran bahwa kredit tersebut benar benar akan dipergunakan untuk membiayai usaha, bukan untuk hal hal yang bersifat spekulatif.
- c. Riwayat hubungan bisnis dengan bank mencakup: Saat mulai hubungan, bidang hubungan bisnis, dan jumlah total hubungan bisnis.

Analisa dalam pemberian kredit adalah dengan menggunakan 5C sebagai berikut:

1. *Character*, sifat dan watak dari nasabah (kejujuran, tanggungjawab, integritas dan konsisten). Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, tercerminkan dari latar belakang debitur baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

2. *Capacity*, kemampuan seseorang untuk menjalankan bisnis. Debitur perlu dianalisis apakah dia mampu memimpin dengan baik dan benar usahanya. Jika dia mampu memimpin usahanya, maka dia juga akan mampu untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian dan perusahaannya tetap berjalan.
3. *Capital*, kondisi keuangan dari nasabah (pendapatan bersihnya). Modal yang besar maka menunjukkan besarnya kemampuan debitur untuk melunasi kewajiban-kewajibannya.
4. *Collateral*, kekayaan yang dijanjikan untuk keamanan dalam transaksi kredit/anggunan. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jika terjadi kredit macet, maka agunan inilah yang digunakan untuk membayar kredit tersebut.
5. *Condition*, faktor luar (kondisi ekonomi) yang mengontrol perusahaan. Menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan dimasa akan datang

Analisa pemberian kredit dengan analisan 5C cenderung kepada watak/ karakter pemohon dan nilai agunan yang dijadikan jaminan oleh nasabah.

Dalam menganalisa jaminan sekurang kurangnya memuat hal hal sebagaiberikut:

- a. Perlu diteliti Status kepemilikan dan asal usul kepemilikan disertai riwayat peralihan haknya serta diteliti keabsahannya pada instansi yang berwenang (untuk nasabah baru atau karena bukti kepemilikan yang diragukan)

- b. Dalam menilai jaminan harus diperhatikan nilai pasar wajar dan nilai likuidasi untuk menghindari over taksasi
- c. Apabila jaminan tersebut dulunya pernah di pakai sebagai jaminan pada Bank yang bersangkutan dan sekarang dijaminan kembali dengan nilai likuiditas yang berbeda/ lebih besar, maka perlu dijelaskan dasar dasar yang logis dari kenaikan nilai likuidasi tersebut.
- d. Perlu diteliti dalam penilaian apakah nilai jaminan sudah termasuk adanya evaluasi dan disertai dengan penjelasannya.
- e. Dalam hal jaminan telah di nilai oleh *appraisal company*, bank perlu mengadakan penilaian kembali terhadap hasil dari penilaian *appraisal company* tersebut.
- f. Dalam hal aktiva tetap perusahaan meningkat setelah adanya fasilitas kredit dari Bank, agar tambahan aktiva tetap tersebut dimasukkan sebagai komponen jaminan.

Berikut ini penulis akan menguraikan tanggapan responden terhadap pengawasan kredit yang diwakilkan oleh 5 pertanyaan berhubungan dengan evaluasi kredit dan pengaruh dari pengawasan kredit tersebut.

Table V.4. Rekapitulasi tanggapan responden terhadap evaluasi kredit.

No	Kategori					Jumlah
	Sangat Setuju	Setuju	Ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	
1	5 (20,83%)	19 (79,17%)	-	-	-	24 (100%)
2	8 (33,33%)	15 (62,5%)	-	1 (4,17%)	-	24 (100%)
3	5 (20,83%)	19 (79,17%)	-	-	-	24 (100%)
4	5 (20,83%)	19 (79,17%)	-	-	-	24 (100%)
5	8 (33,33%)	16 (66,67%)	-	-	-	24 (100%)
Rata-rata	6 (25%)	18 (75%)	-	-	-	24 (100%)

Sumber : data olahan

Dari tabel diatas dapat diketahui rata-rata tanggapan responden terhadap evaluasi kredit sebagai berikut : 6 (25%) menyatakan sangat setuju dan 18 (75%) menyatakan setuju. Maka dapat disimpulkan tanggapan responden terhadap evaluasi kredit adalah setuju.

5.4. Analisis perkembangan UMKM

Secara umum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kedudukan yang sangat potensial pada perekonomian nasional. Dalam perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih tetap menghadapi berbagai permasalahan, baik eksternal maupun internal yang memerlukan kepedulian semua pihak serta keberpijakan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). (Djunaidi, 2000: 47)

Permasalahan Internal berkaitan dengan faktor dari Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) itu sendiri, terutama yang menyangkut kendala-kendala lain yang lebih spesifik, yaitu:

- a. Rendahnya Kualitas sumber Daya manusia pada sektor usaha kecil dan menengah.
- b. Lemahnya Organisasi dan Manajemen
- c. Terbatasnya akses pembiayaan
- d. Terbatasnya jaringan usaha

Sedangkan permasalahan eksternal, meliputi:

- a. Iklim usaha yang kurang kondusif
- b. Persaingan yang tidak seimbang
- c. Kondisi perbankan yang belum sehat
- d. Terbatasnya jaringan usaha

Untuk itu, Agar UMKM benar-benar bisa menjadi pilar utama perekonomian, peningkatan kredit UMKM akan efektif paling tidak harus disertai strategi yang mencakup:

- a. Penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif

- b. Peningkatan kemampuan kewirausahaan
- c. Peningkatan dalam jumlah dan kemudahan persyaratan dalam perkreditan perbankan
- d. Pengembangan perangkat penunjang bagi peningkatan pembiayaan seperti penjaminan kredit
- e. Meningkatkan lembaga keuangan mikro
- f. Meningkatkan layanan KSP/USP koperasi
- g. Peningkatan lembaga keuangan sekunder
- h. Peningkatan jaringan informasi baik pusat maupun daerah
- i. Pengembangan multi finance

Berikut ini penulis akan menguraikan tanggapan responden terhadap perkembangan UMKM yang diwakilkan oleh 5 pertanyaan berhubungan dengan perkembangan UMKM tersebut .

**Table V.5. Rekapitulasi tanggapan responden terhadap perkembangan
UMKM.**

No	Kategori					Jumlah
	Sangat Setuju	Setuju	Ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	
1	2 (8,33%)	12 (50%)	7 (29,17%)	3 (12,5%)	-	24 (100%)
2	3 (12,5%)	15 (62,5%)	-	6 (25%)	-	24 (100%)
3	7 (29,17%)	9 (37,5%)	-	2 (8,33%)	-	24 (100%)
4	12 (50%)	9 (37,5%)	-	3 (12,5%)	-	24 (100%)
5	7 (29,17%)	15 (62,5%)	-	2 (8,33%)	-	24 (100%)
Rata-rata	7 (29,17%)	12 (50%)	1 (4,17%)	4 (16,67%)	-	24 (100%)

Sumber : data olahan

Dari tabel diatas dapat diketahui rata-rata tanggapan responden terhadap perkembangan UMKM sebagai berikut : 7 (29,17%) menyatakan sangat setuju, 12 (50%) menyatakan setuju, 1(4,17%) menyatakan ragu dan 4 (16,67%) menyatakan tidak setuju. Maka dapat disimpulkan tanggapan responden terhadap perkembangan UMKM adalah setuju.

5.5. Metode Analisa Data

5.5.1. Uji Kualitas data

Pengujian kualitas data yaitu menguji validitas dan reliabilitas data yang digunakan. Pengujian validitas digunakan secara keseluruhan terhadap seluruh item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variable penelitian. Pengujian validitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan korelasi Bivariate Person (Produk Momen Person) dan dilakukan dengan one shot method, yaitu metode yang dilakukan sekali pengukuran untuk menguji validitas dari instrument penelitian (Ghozali, 2001:25). Sedangkan penulisan melakukan pengukuran reliabilitas dengan menggunakan teknik Cronbach's Alpha guna menguji kelayakan terhadap konsistensi seluruh skala yang digunakan.

5.5.2. Uji Validitas

Validitas data ditentukan oleh proses pengukuran yang kuat. Suatu instrument pengukuran dikatakan mempunyai validitas yang kuat apabila instrument tersebut mengukur apa yang sebenarnya diukur. Uji validitas data digunakan untuk mengetahui item – item yang ada didalam kuesioner mampu mengukur pengubah yang didapatkan dalam penelitian ini. Hasil pengujian validitas data dapat dilihat pada tabel V.3 berikut

Tabel V.6 Rekapitulasi Uji Validitas

Variable	Person correlation	Kesimpulan
Pengawasan Kredit	0,736**-0,893**	Valid
Evaluasi Kredit	0,767**-0,893**	Valid
Perkembangan UMKM	0,594**-0,712**	Valid

Date: Data primer yang diolah

Hasil pengujian validitas yang disajikan pada tabel IV.3 dapat dilihat bahwa skor masing – masing butir dan skor total (*pearson correlation*) menunjukkan korelasi yang positif dan signifikan pada level 0,05 sehingga seluruh kuesioner dinyatakan valid.

5.5.3. Uji Reliabilitas

Pengujian dilakukan dengan menggunakan teknik *reability analysis* dimana suatu instrument dapat dikatakan reliable apabila memiliki koefisien keandalan atau alpha sebesar : < 0,6 tidak reliable, 0,6 – 0,7 acceptable, 0,7 – 0,8 baik, dan > 0,8 sangat baik. Hasil uji reliabilitas data dapat dilihat pada tabel IV.4 dibawah ini :

Tabel V.7 Hasil Uji Reabilitas Data

Variable	Cronbach Alpha	Kesimpulan
Pengawasan Kredit	0,871	Reliable
Evaluasi Kredit	0,887	Reliable
Pengembangan UMKM	0,683	Reliable

Sumber : Data primer yang diolah

Hasil pengujian reliabilitas yang disajikan pada tabel IV.4 menunjukkan tidak ada koefisien *cronbach alpha* yang kurang dari 0,6. Sehingga instrument tersebut reliable untuk digunakan.

5.5.4. Analisis Koefisien /uji (R)

Tabel V.8 hasil uji R

model summari				
Model	R	R square	Adjusted R square	Std Error of the Estimate
	0.714	0.51	0.488	2.11679

Berdasarkan tabel V.5 maka dapat diketahui bahwa variabel bebas dalam penelitian ini mempunyai hubungan dengan perkembangan variabel terikat. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0.74 atau 71,4%. Nilai R ini menunjukkan bahwa variabel bebas secara bersama sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat sebesar 71,4%.

5.5.5. Koefisien Determinasi berganda (R^2 /Square

Analisis determinasi dalam regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y, berdasarkan tabel V.5 diatas dapat diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0,51 atau 51%. Hal ini menunjukkan bahwa dua variabel bebas secara bersama sama mampu menjelaskan dan memberikan sumbangan terhadap variabel terikat sebesar 51%.

5.5.6. Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa untuk menguji hipotesis – hipotesis dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda dengan bantuan software SPSS versi 17.0

Keseluruhan hipotesis yang diuji ada lima. Pengujian seluruh hipotesis menggunakan uji regresi berganda (*multiple regression*). Tujuannya mengetahui pengaruh pengawasan dan evaluasi kredit terhadap perkembangan usaha mikro

kecil dan menengah (UMKM) di Teluk Kuantan. (Studi kasus pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan). Hasil analisis regresi terlihat pada tabel IV.9 sebagai berikut :

Tabel V.9
Hasil Analisis Regresi, Dependen Variable : perkembangan UMKM

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-6.117	5.884		-1.040
	X1	.891	.182	.710	4.902
	X2	.326	.213	.222	3.531

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Olahan

Persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = -0,082 + 0,891X_1 + 0,326X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Perkembangan UMKM

a = Konstanta

b₁ b₂ = Koefisien Regresi

X₁ = Pengawasan Kredit

X₂ = Evaluasi Kredit

e = Error term

Persamaan regresi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar -6,117: artinya jika pengawasan kredit (X_1), evaluasi kredit (X_2) nilainya adalah -6,117, maka perkembangan UMKM (Y) nilainya adalah -6,117.
2. Koefisien regresi variabel pengawasan kredit (X_1) sebesar 0,891: artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan pengawasan kredit naik 1% maka perkembangan UMKM (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,891. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara pengawasan kredit dengan perkembangan UMKM. Jadi, semakin meningkatnya pengawasan maka semakin meningkat pula perkembangan UMKM pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan.
3. Koefisien regresi variabel evaluasi kredit (X_2) sebesar 0,326: artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan pengaruh evaluasi naik 1% maka perkembangan UMKM (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,326. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara evaluasi kredit dengan perkembangan UMKM. Jadi, semakin meningkatnya evaluasi kredit maka semakin meningkat pula perkembangan UMKM pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan.

5.5.7. Pengujian Variabel Secara Simultan (Uji f)

Tabel V.10. Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	102.756	1	102.756	22.932	.000 ^a
	Residual	98.578	22	4.481		
	Total	201.333	23			

a. Predictors: (Constant), X1

b. Dependent Variable: Y

Dari tabel IV.8 diatas pada model satu untuk semua variabel independen diperoleh angka signifikan (p value) sebesar 0,000 yang berarti bahwa pengawasan dan evaluasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap peningkatan perkembangan UMKM dengan tingkat kesalahan 0%. Karena angka ini lebih kecil dari 5%, maka dapat dikatakan bahwa model ini layak digunakan (signifikan).

Untuk melakukan uji F perlu dibandingkan antara F hitung dengan F tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis kelima ini bisa diterima. Dari hasil perhitungan diketahui hasilnya sebagai berikut:

F hitung adalah sebesar 22,932

F tabel adalah sebesar 3,467

F hitung > F tabel (22,932 > 3,467), maka H_3 diterima.

Dengan pengawasan dan evaluasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap peningkatan perkembangan UMKM. Oleh karena itu, hipotesis ketiga pada penelitian ini diterima yang artinya secara bersama-sama ada

pengaruh signifikan antara pengawasan dan evaluasi terhadap peningkatan perkembangan UMKM.

5.5.8. Pengujian Variabel Secara Parsial (uji t)

H_{A1} : “diduga pengawasan yang dilakukan PT. Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan UMKM di Teluk Kuantan.”

Tabel V.11
Hasil uji t variabel pengawasan

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	.661	3.992		.166
	X1	.896	.187	.714	4.789
					.000

a. Dependent Variable: Y

Dari table V.9 diatas, dapat diketahui nilai t hitungnya adalah sebesar 4,789. Oleh karena itu t hitungnya > t table (4,789 > 1.721), maka dapat disimpulkan bahwa H_1 dapat diterima, artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara pengawasan kredit dengan perkembangan UMKM.

Untuk variable bukti fisik (X_1) memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 (< 5%). Hasil ini mendukung hipotesis pertama (H_1) yang diajukan, karena hasil pengujian ini menunjukkan bahwa pengawasan mempengaruhi perkembangan UMKM pada PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Teluk Kuantan.

H_{A2}: “diduga evaluasi kredit yang dilakukan PT. Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan UMKM di Teluk Kuantan.”

Tabel V.12
Hasil uji t variable evaluasi

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	12.334	6.469		1.907
	X2	.346	.304	.236	3.138
					.070
					.006

a. Dependent Variable: Y

Dari table V.10 diatas, dapat diketahui nilai t hitungnya adalah sebesar 1,138. Oleh karena itu t hitungnya < t table ($3,138 < 1,721$), maka dapat disimpulkan bahwa H₂ dapat diterima, artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara evaluasi kredit dengan perkembangan UMKM.

Untuk variable bukti fisik (X₂) memiliki nilai signifikan sebesar 0,006 (< 5%). Hasil ini mendukung hipotesis kedua (H₂) yang diajukan, karena hasil pengujian ini menunjukkan bahwa evaluasi mempengaruhi perkembangan UMKM pada PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Teluk Kuantan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dalam bab ini, akan dikemukakan beberapa kesimpulan dari uraian-uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya penulis mencoba memberikan beberapa saran sebagai sumbangan pemikiran pada permasalahan tentang perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui pemberian kredit yang diberikan oleh PT. Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan. Adapun kesimpulan yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

Dari hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji regresi berganda yang telah dijelaskan pada bab V dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengujian hipotesis 1 menunjukan bahwa variabel pengawasan kredit (X_1) sebesar 0,891: artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan pengawasan kredit naik 1% maka perkembangan UMKM (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,891. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara pengawasan kredit dengan perkembangan UMKM. Jadi, semakin meningkatnya pengawasan maka semakin meningkat pula perkembangan UMKM pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan.
2. Pengujian hipotesis 2 menunjukan bahwa variabel evaluasi kredit (X_2) sebesar 0,326: artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan pengaruh evaluasi naik 1% maka perkembangan UMKM (Y) akan

mengalami peningkatan sebesar 0,326. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara evaluasi kredit dengan perkembangan UMKM. Jadi, semakin meningkatnya evaluasi kredit maka semakin meningkat pula perkembangan UMKM pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan.

3. Secara simultan atau secara bersama-sama pengawasan dan evaluasi pemberian kredit mempunyai pengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM, hal ini berdasarkan dari uji -f yang menunjukkan $f_{hitung} > f_{tabel}$ ($22,932 > 3,467$) pada taraf signifikan 5%.
4. Secara parsial pengawasan kredit (X_1) mempunyai pengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM, hal ini berdasarkan uji-t yang menunjukkan $t_{hitungnya} > t_{table}$ ($4,789 > 1,721$) dengan nilai signifikan $0,000 (< 5\%)$.
5. Kemudian secara parsial evaluasi kredit (x_2) mempunyai pengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM, hal ini berdasarkan uji-t yang menunjukkan $t_{hitungnya} > t_{table}$ ($3,138 < 1,721$) dengan nilai signifikan $0,006 (< 5\%)$.

6.2. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut :

1. PT. Bank Riau Cabang Teluk Kuantan diharapkan lebih meningkatkan pengawasan dan evaluasi pemberian kredit agar kredit yang disalurkan kepada masyarakat dalam hal ini UMKM dapat meningkatkan perkembangan dari UMKM dan perekonomian masyarakat.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat dan pentingnya menabung untuk masa depan untuk keperluan investasi dalam rangka membangun ekonomi dengan membantu dan mempermudah dalam melengkapi persyaratan pengajuan kredit serta memberi pelatihan dan pembinaan dalam mengelola dana serta segala sesuatu yang dianggap perlu dalam mengembangkan usahanya menjadi lebih profesional dan mandiri lagi dalam menjalani roda perekonomian yang lebih bersaing di masa sekarang dan masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta
- Djunaidi, Hadisumarto, 2000, *Menelusuri Pembinaan dan Pengembangan Wiraswasta*, Prisma. Jakarta,
- Firdaus, Rahmat, 2003, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta. Bandung
- Hasibuan, Malayu S.P. 2004, *Dasar Dasar Perbankan*, PT Bumi Aksara: Jakarta .
- Husein, Umar, 2005, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT. Raja Grafindo Utama; Jakarta
- Kasmir. 2002. *Dasar-dasar Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- .2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Kuncoro, 2002, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, BPFE; Yogyakarta
- Muchdarsyah, Sinungan, 2000, *Manajemen Dana Bank*, Cetakan ke empat, PT. Bumi Aksara: Jakarta
- Muljono, Teguh, Pudjo, 2000, *Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersil*, BPFE. Yogyakarta
- Priyatno, Duwi, 2008, *Mandiri Belajar SPSS*, Mediakom. Yogyakarta
- Rahmadi, Usman, 2001, *Aspek Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama; Jakarta
- Riyai, Veithzal, 2006, *Credit Manajemen*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Siamat, Dahlan. 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Sogiyono, 2001, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta : Bandung
- , 2003, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta : Bandung
- Suhardjono, *Manajemen Perkreditan*, 2003, PT. Bumi Aksara. Jakarta

- Sutojo, Siswanto. 2001. *Analisa Kredit bank Umum*. PT Pustaka Binaman Pressindo: Jakarta
- Suyatno, Thomas (dkk), 2007, *Dasar Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
- Tambunan, Tulus, 2000, *Perkembangan Usaha Skala Kecil di Indonesia*, Mutiara Sumber Widya; Jakarta
- Undang - Undang No.20 tahun 2008
- Undang- Undang No. 10 tahun 1998 *Tentang Kredit*
- Undang- Undang Perbankan No.10 tahun 1998
- Winardi, 2002. *Asas – asas manajemen*, Edisi Ke Tujuh. Alumni Bandung
- Warman, Djohan, 2000, *Kredit Bank Alternatif Pembiayaan dan Pengajuan*, PT. Mutiara Sumber Widya; Jakarta